BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Substansi RPJMD Kabupaten Garut

RPJMD merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan program-program prioritas pembangunan kepala daerah disesuaikan dengan visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Garut tahun 2009-2014, RPJMD berisikan strategi pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk fokus sasaran atau prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

4.1.1 Sasaran Prioritas Pembangunan 2009-2014

Fokus sasaran atau prioritas pembangunan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan setiap tahunnya, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Fokus sasaran pembangunan atau prioritas pembangunan dalam setiap tahunnya menggambarkan makna urgensi pemecahan permasalahan strategis. Konsekuensi logis dari adanya tahapan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD ini adalah dalam penyusunan rencana anggaran pembangunan daerah komposisi anggaran belanja program kegiatan perlu disesuaikan dengan prioritas bidang pembangunan pada masing-masing tahapan. Hal ini mengandung makna bahwa, anggaran belanja program kegiatan yang mendukung prioritas tersebut perlu mendapat porsi lebih guna tercapainya sasaran yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan bahwa prioritas pembangunan tahunan pada RPJMD ini dimulai pada tahun 2010 dan diakhiri pada tahun 2014. Hal ini didasarkan pada skenario pembangunan yang dimulai pada tahun 2010 karena pelaksanaan Tahun Anggaran 2009 masih menggunakan dasar hukum RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2006-2009. Sedangkan untuk tahun 2014 merupakan tahun transisi berisi program-program transisi disebabkan pergantian kepala daerah.

A. Misi I: Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal;

Membangun kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan pencapaian IPM pada suatu daerah. Mengenai perkembangan pencapaian IPM di Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2009, dapat digambarkan, bahwa peningkatan capaian IPM itu, didukung oleh pencapaian nilai indeks pendidikan yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun dengan kontribusi yang relatif rendah dibandingkan dengan indikator lainnya, derajat pendidikan masyarakat secara makro mengalami peningkatan, yang tercermin dari pencapaian nilai indeks pendidikan pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar 82,32 poin, telah mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin atau 0,75% dibandingkan pencapaian tahun 2008 sebesar 81,71 poin. Apabila dibandingkan dengan sasaran pencapaian indeks pendidikan tahun 2009 berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2006 – 2009, yaitu sebesar 83,01 poin, maka pencapaian indeks pendidikan pada

tahun 2009 masih sedikit dibawah sasaran tersebut sebesar 0,69 poin atau 0,83%.

Pencapaian nilai indeks pendidikan ini dipengaruhi oleh pencapaian nilai rata-rata lama sekolah (RLS), dimana pada tahun 2009, RLS diproyeksikan mencapai 7,32 tahun, yang berarti meningkat 0,22 tahun atau 3,10% dari tahun 2008 yang mencapai sebesar 7,1 tahun. Bersamaan dengan itu, angka melek huruf (AMH) sebagai salah satu variabel dari indeks pendidikan, diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,18% menjadi 99,07% pada tahun 2009 dibandingkan dengan capaian tahun 2008 sebesar 98,89%. Sementara dari tahun 2004-2009, AMH mengalami peningkatan sebesar 1,37 Prosen dari pencapaian AMH tahun 2004 sebesar 97,7%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sampai dengan tahun 2009 telah terjadi peningkatan terhadap kemampuan baca masyarakat Kabupaten Garut.

Berdasarkan kedua indikator pendidikan tersebut diatas, rata-rata lama sekolah merupakan hal yang perlu mendapat perhatian lebih, dimana secara makro, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Garut diatas 10 tahun baru mencapai tingkatan SLTP, dan secara makro Jawa Barat masih terpaut 0,26 tahun di bawah angka provinsi.

Selanjutnya dalam pencapaian indeks kesehatan, pada tahun 2009 diproyeksikan mencapai 66,65 poin atau mengalami peningkatan 0,32 poin dari indeks kesehatan tahun 2008 sebesar 66,33 poin. Apabila dibandingkan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2006-2009, maka pencapaian indeks kesehatan pada tahun 2009

diproyeksikan sudah melebihi sasaran tersebut sebesar 0,03 poin atau 0,05%. Peningkatan pencapaian indeks kesehatan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan yang positif dari pencapaian nilai angka harapan hidup (AHH), yang diproyeksikan mencapai 64,99 tahun, meningkat 0,19 tahun atau 0,29 prosen dari tahun 2008 yang mencapai sebesar 64,80 tahun. Dengan kontribusi yang relatif tinggi, kenaikan indikator tersebut merupakan gambaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut secara makro. Kendati demikian, intervensi pemerintah daerah masih sangat diperlukan mengingat jika dibandingkan dengan besaran di Jawa Barat, AHH Kabupaten Garut masih tampak tertinggal cukup jauh, yakni terpaut 3 tahun dan masih relatif rendah dibandingkan kabupaten lain di Jawa Barat. Kondisi tersebut juga merupakan indikasi bahwa status kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut masih tertinggal dibandingkan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.

Angka harapan hidup sebagai suatu variabel dalam indeks pembangunan manusia, akan berkaitan erat dengan angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Berdasarkan kondisi eksisting, hal itu memberikan indikasi bahwa kebijakan pembangunan masih belum cukup berhasil dalam menekan tingginya tingkat kematian bayi, sekalipun demikian diproyeksikan terjadi penurunan angka kematian sebesar 1,47% dari 52,42 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008, menjadi sebesar 51,65 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Disisi lain, angka kematian ibu (AKI) juga diproyeksikan mengalami penurunan

sebesar 3,85% dari sebesar 228,43 per 100.000 kelahiran pada tahun 2008 menjadi sebesar 219,64 per 100.000 kelahiran pada tahun 2009.

1. Penuntasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional;
2. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun paripurna dan implementasi Wajar 12 Tahun;
3. Bebas buta huruf Al-Quran bagi lulusan sekolah;
4. Peningkatan proporsi angka partisipasi siswa SMK menjadi 60%;
5. Pembangunan Gelanggang Olah Raga Ciateul untuk peningkatan prestasi olah raga;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar;
7. Pengembangan Puskesmas DTP sesuai dengan standar kebutuhan;
8. Operasionalisasi Rumah Sakit Pameungpeuk menjadi Tipe C;
9. Peningkatan akses pelayanan kesehatan di Wilayah Garut Utara melalui pembangunan RSU Limbangan;
10. Operasional RSUD dr. Slamet Tipe B Pendidikan;
11. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya produktif;
12. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan Syariat Islam;
13. Pembinaan dan peningkatan peran guru agama, ulama dan sekolah-sekolah keagamaan;
14. Membangun pusat kegiatan keagamaan *(Islamic Centre).*

B. Misi II: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah.

Pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, tantangan yang sangat besar sesungguhnya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan regional, yang secara makro tumbuh dengan lambat, sehingga menyebabkan perekonomian daerah bergerak dengan perputaran yang juga menjadi berat. Terlebih pada tahun 2009, berbagai musibah bencana alam terjadi di Kabupaten Garut, yang tentu saja menambah beban perekonomian masyarakat.

Dampak yang diakibatkan dari bencana alam itu bersifat dimensional, yang tidak hanya menyentuh aspek struktural saja, akan tetapi juga meliputi aspek kultural, sehingga menimbulkan berbagai masalah, terutama kesulitan dan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat. Akibatnya, beban hidup masyarakat semakin berat, dan penambahan penduduk miskin sulit dikendalikan.

Kondisi perekonomian yang memprihatinkan itu, tentunya menyulitkan pengembangan lapangan pekerjaan masyarakat, bahkan justru semakin banyak angkatan kerja produktif di sektor formal maupun informal yang kehilangan pekerjaan, yang menyebabkan masih tingginya angka pengangguran terbuka, yaitu sebanyak 49.861 orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,41% dari angkatan kerja sebanyak 922.311 orang atau 0,54% lebih rendah dari tahun 2008 sebanyak 50.134 orang dengan TPT sebesar 5,46% dari dari angkatan

kerja sebanyak 918.596 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut, masih sulit untuk dapat diserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang, ditambah tingkat kompetensi angkatan kerja yang relatif masih rendah. Namun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut pada tahun 2009 yang berdasarkan data BPS sebanyak 423.188 jiwa atau sebesar 17,77%, hal ini telah menunjukkan angka penurunan sekalipun belum signifikan, yaitu hanya sebesar 1,22% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2008 yang berjumlah 428.395 jiwa atau sebesar 18,27%.

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja pemerintahan daerah, pemaknaan atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2009, tetap diupayakan untuk berpedoman kepada komitmen dan tanggung jawab bersama, sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan, yang pada dasarnya merupakan hasil perumusan kebijakan publik di daerah. Namun demikian, hal itulah yang justru membuat posisi pemerintah menjadi relatif sulit, karena pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di tahun 2009 pada dasarnya merupakan kebijakan dan pertanggungjawaban yang berkelanjutan, sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjaga integritas dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Garut.

Mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembangunan tahun 2009 itu, tentunya turut diwarnai oleh dinamika

dalam pemerintahan daerah dan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, seiring pula dengan perubahan lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai hal yang terjadi, termasuk kasus hukum yang menimpa aparatur pemerintah daerah, menjadi bagian yang turut memberikan pengaruh terhadap proses yang berlangsung di tingkat implementasi pemerintahan dan pembangunan daerah, terlebih dalam kurun waktu yang cukup lama di tahun 2009, pemerintah Kabupaten Garut tidak mempunyai sekretaris daerah definitif. Sekalipun pelaksana tugas sekretaris daerah telah bekerja secara optimal, namun tentu saja kewenangannya yang terbatas menyebabkan banyak hal yang telah menjadi prioritas relatif mengalami beberapa hambatan untuk diimplementasikan secara nyata.

Berkenaan dengan kondisi perekonomian makro Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2009, secara umum dapat dilihat dari angka produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Garut, yang menggambarkan produksi barang dan jasa masyarakat Kabupaten Garut, dimana pada tahun 2009, atas dasar harga berlaku diproyeksikan meningkat sebesar Rp.1,99 trilyun atau 9,81% menjadi Rp.22,358 trilyun dari tahun 2008 sebesar Rp. 20,36 trilyun.

Gambaran tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup singnifikan dari nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah kabupaten garut pada tahun 2009. Kendati demikian, perkembangan itu belum dapat dijadikan indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di Wilayah Garut, karena pada besaran PDRB yang dihitung

atas dasar harga berlaku, masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang atau jasa secara umum. Dalam melaksanakan misi ini, beberapa program pemerintah diantaranya:

1. Gerakan ekonomi mandiri berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata;
2. Pengembangan ekonomi berbasis energi dan sumberdaya mineral;
3. Diversifikasi usaha petani ke agroindustri;
4. Pengembangan destinasi pariwisata pada SKW Cipanas, Pameungpeuk, dan Malangbong;
5. Pembentukan Desa Mandiri Pangan;
6. Perluasan area tangkap ikan laut dan peningkatan kemampuan peralatan tangkap ikan laut;
7. Revitalisasi pasar tradisional, serta pembinaan dan fasilitasi pelaku pasar tradisional;
8. Penumbuhan aktifitas ekonomi pada Pondok Pesantren;
9. Pembentukan regulasi investasi daerah;
10. Pembentukan BUMD dan BLUD;
11. Penanganan dan pengelolaan BUMD (BPR dan PDAM);
12. Penyusunan Roadmap mineral, dan panas bumi;
13. Peningkatan daya saing produk dan peran KUMKM dalam perekonomian daerah.

C. Misi III: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan;

Kinerja program dalam misi ini antara lain peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dan antar lembaga lainnya, peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Sementara itu, dalam hal penataan peraturan perundang-undangan, capaian kinerjanya antara lain terpenuhinya pengadaan pedoman produk hukum daerah yang baik, meliputi 15 buah perda, 15 buah peraturan bupati, 375 buah keputusan bupati.

Dalam hal peningkatan pelayanan manajemen publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat, serta untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan jumlah perijinan yang diterbitkan sebanyak 2.719 perijinan yang menghasilkan retribusi daerah sebesar 1,09 milyar Rupiah lebih.

Berkenaan dengan penataan administrasi kependudukan, diantaranya telah disusun peraturan daerah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelayanan pencetakan dokumen

kependudukan berupa kartu keluarga sebanyak 129.330 lembar serta penerbitan kepemilikan akta catatan sipil sebanyak 16.888 akta.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan melalui pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, lomba desa, penyusunan profil desa dan kelurahan, pembinaan alokasi dana desa, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Adapun prestasi yang diraih pada tahun 2009 yaitu juara tingkat Provinsi Jawa Barat dalam program lomba desa atas nama Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, diimplementasikan diantaranya melalui penyusunan standar satuan harga, penyediaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan APBD, peningkatan manajemen pengadaan barang dan jasa, peningkatan kemampuan SDM dan manajemen pengelolaan BPR, penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, peningkatan manajemen dan optimalisasi pengelolaan aset barang daerah, sosialisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyusunan kajian tentang pemberian tambahan penghasilan PNS.

Upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, antara lain melalui pelaksanaan pendidikan kedinasan dengan hasil antara lain diklat fungsional pengadaan barang dan jasa, diklat manajemen pengelolaan keuangan, pendidikan penjenjangan struktural berupa Diklatpim, Diklat Prajabatan CPNS golongan III, golongan II, dan golongan I; terselenggaranya proses penyelesaian pensiun, kenaikan pangkat dan mutasi pegawai.

Dalam hal pembinaan dan pengembangan aparatur, hasil yang dicapai antara lain berupa pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS sebanyak 60 orang, pengangkatan calon PNS dari tenaga kerja kontrak sebanyak 287 orang, pelaksanaan tes CPNS dari umum lulus sebanyak 410 orang, pengangkatan CPNS dari tenaga dokter PTT untuk daerah terpencil sebanyak 21 orang, serta perpanjangan kontrak kerja TKK sebanyak 1.913 orang. Pelayanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang tepat waktu, pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, serta pemberian penghargaan bagi pns yang berprestasi, terlaksananya pembinaan dan proses penanganan kasus disiplin PNS.

Berkenaan dengan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, hasil yang dicapai antara lain pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 8 Raperda; dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah serta tokoh masyarakat/ tokoh agama untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Garut; rapat-rapat alat kelengkapan dewan; rapat-rapat paripurna; kegiatan reses; kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah; peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah.

Disamping itu, dalam rangka pemeliharaan keamananan dan ketertiban masyarakat, capaian kinerjanya antara lain meningkatnya penanganan penyakit masyarakat melalui operasi ketentraman dan ketertiban umum serta operasi khusus penyakit masyarakat, pelaksanaan kegiatan gerakan disiplin daerah (GDD), pengamanan unjuk rasa, monitoring dan evaluasi perijinan daerah, pendataan cukai rokok dan tembakau, pembinaan aparatur dalam peningkatan sistem keamanan Swakarsa di 42 kecamatan. Beberapa program utama pemerintah diantaranya:

1. Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan;
2. Rasionalisasi struktur kelembagaan dan jumlah aparatur pemerintah daerah;
3. Perumusan konsep SPM pada setiap SKPD dalam peningkatan pelayanan publik;
4. Mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan bersifat aspiratif dan bottom-up;
5. Pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam mewujudkan e-government;
6. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat;
7. Formulasi fungsi dan peran partai politik dalam sistem pemerintahan;
8. Penanganan permasalahan pertanahan;

9. Penanganan pembentukan daerah otonomi baru.

D. Misi IV: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang.

Realisasi program dalam misi ini diantaranya berkaitan dengan capaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan dan perbaikan jalan raya dalam rangka melancarkan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Garut.. Selanjutnya pada sektor pengelolaan sumber daya air dan irigasi, telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah irigasi, serta mengupayakan pengelolaan infrastruktur sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi luas areal banjir, dan pengendalian banjir. Program utama Pemerintah Kabupaten Garut diantaranya:

1. Peningkatan kemantapan jalan kabupaten;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan antar pusat pertumbuhan dan kecamatan di Wilayah Selatan serta jalur-jalur vertikal menuju Jalan Lintas Selatan;
3. Pembangunan jalan By-Pass Garut dan operasionalisasi pada tahun 2014;
4. Peningkatan kemantapan jaringan irigasi pemerintah dan Jaringan Irigasi perdesaan;
5. Pembangunan Bendung Copong Selesai pada tahun 2014;
6. Pengembangan Terminal Tipe A dan B serta pembangunan sub terminal pada pusat-pusat pertumbuhan;

7. Penyusunan Feasibility Studi untuk Pelabuhan Laut dan transportasi udara di Wilayah Selatan;
8. Pembangunan rumah susun, Kasiba dan Lisiba dalam penyediaan rumah yang memenuhi estándar kesehatan;
9. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan persampahan;
10. Penyusunan rencana penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, implementatif dan berkelanjutan;
11. Penyusunan peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
12. Penanganan lahan kritis dan pengendalian degradasi sumber daya alam dan lingkungan;
13. Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan Limbah industri dan non industri, limbah padat, cair dan gas.

4.1.2 Program Akselerasi Pembangunan

Program akselerasi pembangunan ini merupakan program-program prioritas yang merupakan landasan bagi implementasi program-program pada prioritas tahunan sesuai dengan skenario pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 yang dimulai pada Tahun 2010, sehingga pelaksanaan program akselerasi ini didorong untuk dapat realisasikan pada Tahun 2009. Adapun program-program akselerasi tersebut yaitu:

1) Penyusunan konsep penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan sektoral;
2) Penyusunan konsep ekonomi mandiri berbasis potensi lokal (Gerakan Ekonomi Mandiri Berbasis Pariwisata, Agribisnis, Agroindustri).
3) Penyusunan konsep pengembangan sistem dan iklim investasi sebagai penunjang perekonomian daerah Penyusunan konsep pembentukan BLUD untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang dikelola secara profesional.
4) Penyusunan konsep pembentukan BLUD untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang dikelola secara profesional
5) Penyusunan konsep pembinaan dan pengembangan pasar tradisional;
6) Penyusunan roadmap peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.

4.1.3 Kebijakan dan Program Kerja

Misi 1: Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi berlandaskan nilai agama, sosial dan budaya sesuai kearifan lokal

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pembangunan bidang

pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diantaranya adalah masih belum meratanya pendistribusian tenaga pengajar, masih rendahnya aksesibilitas SD/SMP bagi masyarakat serta masih tingginya angka DO untuk usia wajardikdas. Sementara dalam pelaksanaan program Pendidikan Menengah, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat di daerah terpencil dalam penyelenggaraan pendidikan menengah. Untuk aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, perlu dibentuk lembaga tri partit antara pemerintah, dunia usaha, dan sekolah sebagai media untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, termasuk penyerapan lulusannya di dunia kerja. Seiring dengan hal tersebut perlu upaya untuk mengedepankan sekolah kejuruan dengan fokus pembelajaran pada pendidikan vokasional (*life skill*) yang mengutamakan kompetensi daerah.

Kebijakan:

a. Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan.
b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.
c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan.
d. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masayarakat.
e. Pengarustamaan Gender bidang pendidikan.

Strategi:

a. Meningkatan angka partisipasi pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang.
c. Meningkatkan kualitas setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan dalam meningkatkan daya saing.
d. Penataan relevansi pendidikan yan berorientasi pada upaya pencapaian keunggulan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. Penataan program studi pendidikan kejuruan pada pendidikan formal dan non formal yang sejalan dengan perkembangan teknologi.
f. Meningkatkan angka melek huruf.
g. Meningkatkan profesionalisme, perlindungan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
h. Mengembangkan sistem pembinaan karier pendidik dan tenaga pendidik yang sistematis, transparan dan akuntabel.
i. Mengembangkan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang akuntabel, bermutu, terarah dan terstandar untuk meningkatkan citra publik pendidikan.
j. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi pendidikan.
k. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas di lingkungan dinas pendidikan dan UPTD Pendidikan Kecamatan.

l. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

m. Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan pendidikan.

Program Kerja:

a. Percepatan penutasan wajib belajar 9 tahun.

b. Pencanangan wajib belajar 12 tahun.

c. Pengembangan Perluasan,dan pemerataan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

d. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

e. Pengembangan Kurikulum dan proses pembelajaran.

f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

g. Pengembangan sistem penilaian pendidikan.

h. Peningkatan relevansi pendidikan dan pendidikan vokasi.

i. Penataan program studi pendidikan kejuruan pada pendidikan formal dan non formal.

j. Pemberantasan buta huruf latin bagi masyarakat.

k. Pemberantasan buta huruf Al-Quran bagi pelajar.

l. Peningkatan profesionalisme, perlindungan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

m. Pengembangan sistem pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan.

n. Pengembangan sistem pengelolaan satuan pendidikan.

o. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pendidikan.

p. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran pendidikan.

q. Peningkatan budaya baca.

r. Peningkatan kualitas pelayanan.

s. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perpustakaan.

t. Peningkatan otomatisasi perpustakaan berbasis teknologi informasi.

u. Peningkatan peran serta wanita dalam pembangunan pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Namun demikian, pencapaian indikator kesehatan di Kabupaten Garut masih berada di bawah kabupaten/ kota lainnya di Jawa Barat, meskipun dari tahun ke tahun terjadi peningkatan Indeks Kesehatan yang diperoleh dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir, pada tahun 2010 diproyeksikan mencapai 66 tahun (angka sangat sementara), yang berarti meningkat 1,5 tahun atau 1,74% dari Tahun 2004 yang baru mencapai sebesar 64,3 tahun (angka perbaikan).

Kemungkinan penyebab masih relatif tingginya angka kematian bayi dan ibu di Kabupaten Garut seperti umumnya di Jawa Barat, jika dikaitkan dengan teori, adalah masih relatif tingginya persentase penolong persalinan oleh tenaga non medis, tingkat pendidikan para ibu yang masih rendah, tingkat ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang masih relatif rendah, masih tingginya presentase penduduk yang tidak dapat menjangkau fasilitas dan tenaga kesehatan karena penyebarannya yang masih belum merata, masih rendahnya rata-rata umur perempuan saat perkawinan pertama, status gizi balita yang masih

relatif rendah yaitu pada tahun 2008 status Gizi Buruk sebanyak 1.151 orang atau 0,66%, Gizi Kurang sebanyak 25.324 orang atau 11,06%, Gizi Baik sebanyak 199.788 orang atau 87,27%, Gizi Lebih sebanyak 2.303 orang atau 1,01%, dan KEP sebanyak 26.835 orang atau 11,72%.

Dari indikator-indikator di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk mencapai kondisi derajat kesehatan yang ideal, Kabupaten Garut masih memerlukan tambahan yang cukup besar baik untuk fasilitas maupun tenaga kesehatan. Salah satu cara yang paling efektif saat ini adalah dengan menciptakan iklim yang dapat memancing para investor untuk menanamkan modalnya khususnya di sektor jasa pelayanan kesehatan, sebab dari segi pangsa pasar di Kabupaten Garut tampak telah cukup potensial yang terlihat dari jumlah penduduk yang sangat besar serta kesadaran akan pentingnya kesehatan yang terlihat relatif membaik. Selain itu dari penambahan tersebut juga harus diperhatikan distribusi dari sarana dan tenaga kesehatan agar dapat menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat yang disertai dengan upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan kualitas ketenagaan, peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

Kebijakan:

a. Mengembangkan sistem operasional pelayanan kesehatan dasar rujukan terutama bagi masyarakat miskin.
b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

c. Meningkatkan akurasi dan aktualisasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan.
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan.
e. Pengembangan akses pelayanan kesehatan rujukan.

Strategi:

a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
b. Pembebasaan retribusi pelayanan kesehatan dasar.
c. Peningkatan peran serta masyarakat.
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan.
e. Akselerasi sarana dan prasarana kesehatan.
f. Peningkatan pembiayaan kesehatan.
g. Pengembangan model puskesmas DTP.
h. Peningkatan jangkauan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan (pembangunan rumah sakit Garut Selatan dan pembangunan rumah sakit Garut Utara).

Program Kerja:

a. Program obat dan perbekalan kesehatan.
b. Program upaya kesehatan masayarakat.
c. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
d. Program standarisasi pelayanan kesehatan.
e. Program perbaikan gizi masayarakat.
f. Program pengembangan lingkungan sehat.
g. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

h. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
i. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.
j. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata dan jaringannya.
k. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
l. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

3. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Urusan Pemberdayaan Perempuan

Dalam hal keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan, capaian kinerjanya antara lain terbinanya peserta KB aktif sebanyak 329.214 orang atau 72,27%, tersedianya tenaga pendamping dan keluarga terhadap kegiatan BKB, terlaksananya penggalangan kepedulian masyarakat dalam kegiatan P2WKSS, KB-KES Bhayangkara, KB-KES TNI, KB-KES PKK dan Harganas, meningkatnya fungsi dan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan, meningkatnya penyelenggaraan pembinaan program P2WKSS, meningkatnya penyelenggaraan Posyandu di desa siaga, tertanganinya kekerasan dan eksplotasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia perempuan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Beberapa prestasi yang diraih pada tahun 2009 diantaranya :

1) Juara I, tingkat Provinsi Jawa Barat peserta KB Lestari 10 tahun dalam rangka Harganas;
2) Juara I, Tingkat Provinsi Jawa Barat lomba advokasi dan KIE melalui media seni;
3) Juara II, Tingkat Provinsi Jawa Barat lomba cerdas cermat kader BKB dalam rangka hari ibu;
4) Juara nominasi, tingkat Provinsi Jawa Barat program lomba Keluarga Harmonis dalam rangka Harganas;
5) Juara nominasi (harapan III), Tingkat Provinsi Jawa Barat program P2WKSS atas nama P2WKSS Desa Karangwangi Kecamatan Mekarmukti.

Kebijakan:

a. Menurunkan tingkat kelahiran (TFR) melalui pengendalian kehamilan serta meningkatkan jumlah cakupan peserta KB.
b. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha.

Strategi:

a. Jaminan ketersediaan pelayanan yang berkualitas.
b. Peningkatan kualitas data dan informasi.
c. Pembinaan usaha ekonomi produktif melalui keluarga.
d. Peningkatan Advokasi dan sosialisasi guna mempercepat mind set tentang persepsi gender.

Program Kerja:

a. Pelayanan KB/KR.

b. Pelayanan Kontrasepsi.
c. Kesehatan Reproduksi Remaja.
d. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
e. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga pada kelompok UPPKS.
f. Pemberdayaan dan Fasilitasi pemahaman fungsi-fungsi keluarga.
g. Kesetaraan keadilan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

4. Urusan Sosial

Misi selanjutnya sangat erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, capaian yang diperoleh antara lain menurunnya jumlah keluarga miskin yang berumah tidak layak huni sebanyak 60 keluarga, pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia serta pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin sebanyak 120 KK. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), telah dilakukan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana sebanyak 3.260 orang dan orang terlantar sebanyak 15 orang, diklat keterampilan berusaha bagi gepeng serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Karang Taruna.

Kebijakan:

a. Meningkatkan penggalian potensi, kemauan, kemampuan dan keterampilan serta sumber kehidupan PMKS.
b. Pemberdayaan Kafilah dalam prestasi bidang keagamaan.

c. Peningkatan kerukunan dan silaturahmi antar umat.
d. Penataan pelayanan dalam bidang beribadah.
e. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat maupun seluruh unsur masyarakat.
f. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.
g. Implementasi pemahaman mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat.

Strategi:

a. Memberdayakan dan mengembangkan keberfungsian sosial bagi PMKS.
b. Menyelenggakan usaha kesejahteraan sosial dengan menitik beratkan partisipasi sosial masyarakat.
c. Meningkatkan Kepedulian Sosial Masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.
d. Meningkatkan prestasi pemahaman penghayatan, pengamalan dan pengembangan isi kandungan Al Qur'an.
e. Meningkatkan suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pembinaan kerukunan intern dan antar umat beragama.
f. Meningkatkan tertib data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran program di bidang agama.
g. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama untuk menciptakan Garut yang aman dan damai.

h. Meningkatkan peran dan kemampuan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
i. pembinaan khusus bagi guru agama baik formal maupun non formal, ulama dan sekolah-sekolah agama.

Program Kerja:

a. Pemberdayaan Fakir Miskin KAT dan PMKS lainnya.
b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
c. Pembinaan Anak Terlantar.
d. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Terlantar.
e. Pembinaan Panti Asuhan / Jompo.
f. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.
g. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
h. Peningkatan kemampuan pemahaman penghayatan dan pengembangan Al Qur'an.
i. Terwujudnya insan yang berakhlakul karimah melalui pelaksanaan Hari-hari besar Islam.
j. Meningkatkan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan data informasi dan pelayanan dan kenyamanan dalam beribadah.
k. Program Peningkatan Pendidikan Agama.
l. Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama.
m. Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten.
n. Peringatan hari-hari besar Keagamaan.
o. Bantuan pelayanan haji.

p. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

5. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga, hasil yang dicapai antara lain terbinanya organisasi kepemudaan Paskibra, OSIS, Pramuka dan PMR; terdapatnya atlet pelajar yang berkualitas untuk menjadi binaan PPLP Tingkat Provinsi Jawa Barat; serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung olahraga masyarakat yang berkualitas. Prestasi yang diraih pada tahun 2009 diantaranya medali perak oleh Delegasi Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kabupaten Garut di ajang Kuala Lumpur International Drum Band Competition 2009.

Kebijakan:

a. Pemberdayaan pemuda dalam proses pembangunan.
b. Pembibitan, permaslahan dan peningkatan prestasi bidang olahraga.

Strategi:

a. Meningkatakan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
b. Mengembangkan sistem pembibitan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah.

Program Kerja:

a. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda.
b. Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
c. Pemberdayaan organisasi pemuda dalam pembangunan.

d. Pembibitan atlet berbakat.

e. Pemasalan olahraga.

f. Peningkatan prestasi olahraga.

g. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasaran olahraga.

6. Urusan Ketenagakerjaan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, beberapa sasaran pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dicapai sampai dengan tahun 2009 diantaranya menurunnya tingkat pengangguran yang diproyeksikan mencapai sebesar 5,41% dari tahun 2008 sebesar 5,46%; meningkatnya keterampilan tenaga kerja; meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja; serta meningkatnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

Berkenaan dengan upaya meningkatkan lapangan kerja, kegiatan yang telah dilakukan antara lain penyusunan informasi bursa ketenagakerjaan dengan terlayaninya pendaftaran pencari kerja sebanyak 23.007 orang dan tersalurkannya tenaga kerja melalui AKL, Akad sebanyak 584 orang, terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja, pemberian kerja sistem Padat Karya Produktif (PKP) dengan hasil tersedianya sarana jalan desa sepanjang 6.500 meter, saluran air 19.800 meter dan jalan lingkungan 1.000 meter di 20 lokasi.

Capaian kinerja lainnya dalam hubungan kerja dalam negeri dari target 700 orang dapat terealisasi 2.520 orang (360%), luar negeri dari target 150 orang dapat terealisasi 197 orang (131%). Sementara diluar

hubungan kerja dengan target 1.500 orang dan terealisasi 4.200 orang (284%). Penerapan peraturan ketenagakerjaan pada 20 perusahaan, pencapaian UMK dari target 81% dapat terealisasi 81,5%, serta penyelesaian kasus ketenagakerjaan yang muncul. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja usia 10 tahun keatas pada tahun 2009 diproyeksikan mencapai 899.372 orang atau meningkat 0,97% dibandingkan pada tahun 2008 sebanyak 890.740 orang.

Kebijakan:

a. Menumbuhkan lapangan usaha kerja produktif untuk peningkatan daya beli masyarakat dan pengurangan pengangguran.

Strategi:

a. Pelatihan, sertifikasi, penempatan dan pembinaan, pengawasan dan tindakan hukum.
b. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja.

Program Kerja:

a. Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.
b. Program pelatihan tenaga kerja dan perlindungan hak-hak pekerja.
c. Peningkatan Kwalitas dan produktifitas Tenaga Kerja.
d. Peningkatan Kesempatan Kerja.
e. Pelayanan Antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja On Line.
f. Pemberdayaan Bursa Kerja swasta.
g. Pengembangan kesempatan kerja pedesaan dan perkotaan.

Misi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis, agroindustri, kelautan dan pariwisata disertai pengembangan seni budaya daerah.

1. Urusan Pertanian

Sektor andalan atau sektor yang memberi sumbangan terbesar PAD pada tahun 2009 masih didominasi oleh pertanian, dimana pada tahun 2009, sektor ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar 10,02 trilyun Rupiah atau meningkat sebesar Rp.729,798 milyar dari tahun 2008 sebesar Rp.9,291 trilyun. Kondisi tersebut kiranya dapat dipahami, karena sektor pertanian dengan pengelolaan yang cenderung masih tradisional, tidak tergantung pada bahan impor dan berbasis teknologi sederhana sehingga merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Garut sampai saat ini.

Sampai tahun 2009, perekonomian Kabupaten Garut masih didominasi oleh sektor pertanian, dengan kontribusi pembentukan nilai tambah diproyeksikan sebesar 44,82% terhadap PDRB, atau berarti sedikit mengalami penurunan dari 45,64% pada tahun 2008. Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan (tabama), diikuti oleh sub sektor lainnya yaitu subsektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Namun apabila ditelaah lebih dalam, selama periode tahun 2004-2009 kontribusi nilai tambah di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana semula sebesar 50,70% pada tahun 2004 menjadi 44,82% pada tahun 2009.

Kondisi tersebut dapat dimaklumi karena selain penciptaan nilai tambah di sektor lain yang lebih cepat, terutama pada sektor industri dan perdagangan, juga karena luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman.

Kebijakan:

a. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian.
b. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perkebunan.
c. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan.

Strategi:

a. Meningkatkan peran dan dan kemampuan usaha petani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan.
b. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan.
c. Mengembangkan pasar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta peternakan.
d. Meningkatkan daya saing produk perkebunan.
e. Pengembangan kapasitas kawasan perkebunan.
f. Mewujudkan wilayah bebas bahaya penyakit hewan/ternak serta meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH).

Program Kerja:

a. Peningkatan Kesejahteraan Petani.
b. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

c. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

d. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

e. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.

f. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

g. Pengembangan Agribisnis (Usulan).

h. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

i. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

j. Peningkatan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular.

k. Penyidikan dan Pemetaan Sebaran Penyakit Hewan Menular.

l. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular.

m. Pembangunan sarana prasarana pasar produksi hasil peternakan

n. Pengembangan Kemitraan.

2. Urusan Ketahanan Pangan

Ketersediaan bahan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Garut pada tahun 2009 secara umum mengalami surplus seperti beras surplus sebanyak 77,81 kg/kapita/tahun, jagung sebanyak 487,02 kg/kapita/tahun, umbi-umbian sebanyak 34,48 kg/kapita/tahun, buah-buahan mengalami surplus sebanyak 106,78 kg/kapita/tahun, kacang-kacangan 65,20 kg/kapita/tahun, sayuran mengalami surplus sebesar 362,77 kg/kapita/tahun dan buah-buahan mengalami surplus 106,78 kg/kapita/tahun. Sementara itu, untuk pencapaian konsumsi ternak selama tahun 2009 masing-masing menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan tahun 2008, yakni konsumsi daging mencapai 31,6%, telur 51,9% dan susu 1,8%. Namun jika dilihat

dari tingkat konsumsi perkapita/tahun, dibandingkan dengan norma gizi, angka pencapaiannya masih rendah.

Ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi yang cukup tersebut, baik secara kuantitas maupun secara kualitas memberikan dampak positif terhadap berbagai faktor pembangunan, yaitu terhadap kemudahan distribusi dalam menjamin efisiensi, daya dorong tumbuhnya sektor lain, tingkat kesehatan masyarakat, dan akan terhindarnya dari kerawanan pangan di suatu daerah akibat kelangkaan bahan pangan. Namun demikian surplus ketersediaan pangan tersebut tentunya harus bersinergi dengan upaya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Kondisi ini akan merupakan faktor yang fundamental dalam pembangunan daerah.

Kebijakan:

a. Meningkatkan pembangunan sistem ketahanan pangan dan pengembangan penyuluhan pertanian.

Strategi:

a. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan dan Pengembangan Penyuluhan Pertanian.

Program Kerja:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan.

3. Urusan Kehutanan

Berkenaan dengan pembinaan hutan, produksi hutan dan pengelolaan lingkungan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, mencapai hasil berupa produksi hutan rakyat pada tahun 2009 sebanyak

38.580,95 meter kubik meningkat dari tahun 2008 sebanyak 17.796,33 meter kubik. Selain itu dilaksanakan rehabilitasi hutan produksi di 9 BKPH seluas 112,10 hektar. Kebijakan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) dalam bentuk sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) pada tahun 2009 dilaksanakan pengembangan di sembilan desa pada lima kecamatan, dengan komoditas tanaman kopi. Adapun pengembangan aneka usaha kehutanan berupa sutera alam, jamur kayu, lebah madu, anyaman, burung walet dan meubeler. Keberhasilan kegiatan rehabilitasi lahan kritis menjadi seluas 31.554 hektar tidak terlepas dari pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangannya.

Kebijakan:

a. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil kehutanan.

Strategi:

a. Meningkatkan peran dan kemampuan usaha petani.
b. Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan.

Program Kerja:

a. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
b. Program Pembinaan dan penertiban Industri Hasil Hutan.

4. Urusan Kebudayaan

Kebijakan:

a. Penataan sistem nilai budaya sunda yang berbudi luhur yang aplikasinya di masyarakat melalui pemasyarakatan nilai-nilai budi pekerti sunda disamping bahasa dan sastra sunda.

Strategi:

a. Pengembangan industri dan karya budaya serta kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif.
b. Pengembangan kebebasan berkreasi dalam seni dengan tetap mengacu pada aspek etika, moral, estetika dan agama serta adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalty bagi pelaku seni dan budaya.
c. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian daerah yang lebih kreatif dan inofatif.

Program Kerja:

a. Pengembangan pengelolaan kekayaan budaya daerah.
b. Peningkatan apresiasi seni budaya daerah.
c. Pelestarian nilai kesenian dan kebudayaan tradisional.

5. Urusan Pariwisata

Penguatan struktur perekonomian daerah lainnya yang menjadi fokus perhatian pada pelaksanaan pembangunan tahun 2009 adalah bidang pariwisata. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2009 melalui destinasi kepariwisataan dan pengembangan kemitraan yang meliputi pengembangan objek wisata unggulan, penyusunan potensi pariwisata unggulan dalam rangka peningkatan PAD, pengembangan daerah tujuan wisata, pengembangan sumber daya manusia dan

profesionalisme bidang pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Keberhasilan program-program sektor kepariwisataan dari aspek keluaran makro antara lain terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan sebesar 4,52% dari sebanyak 1.597.126 wisatawan pada tahun 2008 menjadi 1.650.913 wisatawan. Untuk itu, dalam rangka mendorong pariwisata sebagai salah satu komoditi unggulan daerah, ke depan perlu terus dilakukan pembenahan terhadap infrastruktur dasar pariwisata, pemahaman pelaku wisata akan sadar wisata dan Sapta Pesona serta promosi wisata. Beberapa prestasi yang diraih di bidang kebudayaan dan pariwisata diantaranya :

a) Juara 2 musik kolaborasi etnis tk. Jawa barat tahun 2009;
b) Juara 2 pasanggiri calung tk. Jawa barat tahun 2009;
c) Juara harapan 1 festival kaulinan barudak tk. Provinsi tahun 2009;
d) Juara 3 pameran kemilau nusantara tk. Jawa barat tahun 2009.

Kebijakan:

a. Menjadikan pariwisata sebagai penarik aktifitas ekonomi yang mempunyai daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata.

Strategi:

a. Peningkatan kualitas obyek wisata yang sudah ada.

Program Kerja:

a. Peningkatan destinasi pariwisata.
b. Pengembangan Kemitraan.
c. Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

6. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Garut merupakan daerah yang memliki wilayah perairan/ kelautan yang sangat luas. Hal tersebut sangat memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat Garut sebagai kekayaan alam yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sudah semestinya pemerintah beserta masyarakat setempat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan kekayaan alam tersebut, seperti meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan:

a. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Strategi:

a. Peningkatan penangkapan, budidaya dan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk.

Program Kerja:

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
b. Pengembangan budidaya perikanan.
c. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
d. Pengembangan perikanan tangkap.
e. Pengembangan sistem penyuluhan.
f. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan.
g. peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.

h. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
i. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SD Kelautan.

7. Urusan Industri

Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat secara umum, walaupun masih relatif rendah, namun tampak mengalami peningkatan yang cukup konsisten selama periode 2004-2009. Kontribusi sektor industri dan pengolahan pada tahun 2009 diproyeksikan mencapai sebesar 7,80% atau mengalami peningkatan 0,29% dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 7,51%, sementara dibandingkan tahun 2004 yang masih mencapai 6,65% diproyeksikan mengalami peningkatan 1,15%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecepatan sektor industri pengolahan dalam pembentukan nilai tambah dapat dikatakan tinggi, sehingga dapat menggeser struktur ekonomi di wilayah Garut.

Kebijakan:

a. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil industri IKM.

Strategi:

a. Meningkatkan peran dan kemampuan perajin IKM.
b. Peningkatan produksi industri dan Pengembangan Industri.

Program Kerja:

a. Pengembangan SDM industri.
b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
c. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.

d. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi.

e. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

f. Penataan Struktur Industri.

8. Urusan Perdagangan

Sektor yang cukup dominan terhadap PAD Kabupaten Garut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana pada tahun 2009 sektor perdagangan, hotel dan restoran diproyeksikan mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp.6,060 trilyun dengan kontribusi sebesar 27,10%, atau mengalami peningkatan 11,31% dari sebesar Rp.5,444 trilyun pada tahun 2008 dengan kontribusi sebesar 26,74%. Peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran cenderung terus mengalami peningkatan nilai tambah selama periode tahun 2004-2009 yaitu dari sebesar Rp.2,143 trilyun atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 dengan kontribusi sebesar 24,64% menjadi sebesar Rp.6,060 trilyun pada tahun 2009 dengan kontribusi sebesar 27,10%.

Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang/ jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Garut. Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor hotel dan restoran. Pada dasarnya, subsektor hotel dan restoran, di Kabupaten Garut merupakan potensi yang masih dapat dikembangkan lebih jauh, karena banyak wilayah pariwisata di garut yang dapat dikembangkan sampai pada skala

nasional, atau bahkan sampai skala internasional. Kendala umum yang dihadapi untuk dapat mengembangkan potensi tersebut adalah sulitnya menumbuhkan minat para investor baik lokal maupun internasional untuk menanamkan investasi di kabupaten garut yang infrastrukturnya terlihat masih sangat minim.

Kebijakan:

a. Meningkatkan akses dan distribusi perdagangan.
b. Meningkatnya Sistem Perdagangan.

Strategi:

a. Mengupayakan ketersediaan dan keamanan komoditas perdagangan yang memadai.
b. Revitalisasi pasar tradisional.

Program Kerja:

a. Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
b. Peningkatan effisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
c. Peningkatan dan pengembangan ekspor.
d. Pembinaan pedagang kakilima dan asongan.
e. Pengembangan SDM aparatur perdagangan.
f. Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri.

9. Urusan Koperasi dan UKM

Pemerintah Kabupaten Garut senantiasa memperhatikan keberadaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam rangka mewujudkan misi meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, beberapa sasaran pelaksanaan pembangunan daerah yang

telah dicapai sampai dengan tahun 2009 diantaranya meningkatnya indeks daya beli menjadi 64,52 poin dari sasaran sebesar 61 poin; meningkatnya kontribusi peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta Baitul Mal Wat Tamwil terhadap PDRB; terselenggaranya pengembangan dan penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan daerah; serta berkembangnya usaha kepariwisataan.

Berkenaan dengan perkembangan usaha kecil menengah, jumlah UKM mengalami peningkatan 3,9%, yakni dari 12.277 unit pada tahun 2008 menjadi 12.768 unit. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap oleh kegiatan UKM pada tahun 2009 sebanyak 32.736 orang, meningkat sebesar 11,4% dari tahun 2008 sebanyak 29.386 orang.

Sementara itu keberhasilan pembangunan BMT yang dicapai pada tahun 2009 berjumlah 68 unit meningkat sebesar 6,25% bila dibandingkan tahun 2008 berjumlah 64 unit. Disamping itu, kemampuan modal BMT meningkat sebesar 2,68%, volume usaha meningkat sebesar 9,6%, serta sisa hasil usaha (SHU) mengalami peningkatan sebesar 5,7%.

Keberhasilan pembangunan perkoperasian yang telah dicapai pada tahun 2009 antara lain dapat dilihat dari peningkatan jumlah koperasi sebesar 2,59% mencapai 1.225 unit dari tahun 2008 sebanyak 1.194 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 230.446 orang. Jumlah modal usaha mengalami kenaikan sebesar 12,47%; volume usaha meningkat 11,55%; serta jumlah sisa hasil usaha (SHU) naik 27,01%.

Berkat dorongan dan motivasi serta berbagai kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan KUMKM, beberapa prestasi yang telah diraih pada tahun 2009 diantaranya Penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat diraih oleh Koperasi Bina Usaha SMKN I Garut. Disamping itu KUMKM di Kabupaten Garut telah mendapat kepercayaan untuk dijadikan tempat magang, praktek lapangan/ studi banding oleh KUMKM lainnya baik lokal, regional dan nasional. KUMKM dimaksud diantaranya: KUD Mandiri Bayongbong, KUD Mandiri Cisurupan, KPGS Cikajang, Primkopti, KSP Raharja, KPRI Sasakadana, Kopkar Telkom, Kopkar Dodol Picnic, PD. Dodol Pusaka, Sentra Penyamakan dan kerajinan kulit Garut.

Dalam rangka mengembangkan usaha berskala kecil dan menengah selama tahun 2009, pemerintah Kabupaten Garut telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui promosi, pembinaan kelembagaan, pengembangan usaha daerah, dan program penyertaan modal pemerintah.

Kebijakan:

a. Meningkatkan peran KUMKM dalam perekonomian daerah, khususnya yang berbasis agribisnis agroindustri, kelautan dan pariwisata.

Strategi:

a. Menguatkan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM.

Program Kerja:

a. Penciptaan iklim usaha- usaha KUMKM yang kondusif.
b. Pengembangan kewirausahaan, dan keunggulan kompetitif KUMKM.
c. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM.
d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
e. Pembinaan dan pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non-Perbankan.

10. Urusan Penanaman Modal

Laju pertumbuhan Investasi yang ditanamkan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada periode Tahun 2009–2010, memperlihatkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini memberikan sinyalemen bahwa iklim investasi di Kabupaten Garut, cukup memberikan peluang para pemodal untuk menanamkan investasinya. Namun masih memberikan indikasi bahwa investasi yang cukup besar tersebut, belum sepenuhnya dapat memberikan efek langsung dalam meningkatkan kualitas dan menyerap sumber daya manusia daerah.

Tabel 4.1
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi) dan Laju Investasi Tahun 2005-2009

URAIAN	TAHUN				
	2005	2006	2007	2008	2009*
Pembentukan Modal Tetap Broto (PMTB) a.d.h.Berlaku (Milyar Rp.)	1.796,32	1.983,70	2.293,70	2.462,37	2.922,46
Laju Investasi (%)	22,03	10,43	15,63	7,35	18,68

Sumber : BPS Kab. Garut, Desember 2009, *) Angka Sangat Sementara

Kebijakan:

a. Meningkatkan investasi di daerah.

Strategi:

a. Inventariasi potensi daerah, penciptaan iklim yang kondusif dan promosi investasi.

Program Kerja:

a. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
b. Peningkatan iklim dan realisasi investasi.
c. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

11. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berkenaan dengan urusan energi dan sumber daya mineral, pemerintah sangat berperan terhadap pengendalian aktivitas penambangan, diantaranya dengan melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan melalui perizinan untuk perusahaan yang akan melakukan kegiatan penambangan. Jumlah perusahaan pertambangan yang mempunyai izin pertambangan yaitu kuasa pertambangan (KP) atau ijin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam pada tahun 2008 sebanyak 22 perusahaan sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 20 perusahaan. Sementara itu pada tahun 2009 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP eksploitasi mineral non logam sebanyak 38 perusahaan. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2008 sebanyak 52 perusahaan. Pada tahun 2008 jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki IUP eksploitasi mineral logam sebanyak 6 perusahaan, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 8 perusahaan.

Kebijakan:

a. Meningkatkan Nilai tambah Produk Bahan Galian.

Strategi:

a. Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah secara profesional.

Program Kerja:

a. Pengembangan Usaha Pertambangan Rakyat Skala Kecil.
b. Pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan bahan galian.
c. Pembinaan Teknik Penambangan Bawah Tanah (Under Ground Minning) Sistem Penyanggaan, Ventilasi Tambang, Teknik Bukaan.
d. Pelatihan Pengolahan Batu setengah Permata.
e. Pengembangan dan Pengkajian Batu Bara peringkat rendah sub-bituminous dan bituminous sebagai bahan bakar alternatif untuk konsumsi industri dan usaha kecil menengah.
f. Penyusunan profil investasi.
g. Pembinaan dan pengendalian potensi pertambangan emas rakyat (tradisional).
h. Menyelenggarakan apresiasi bidang pertambangan.
i. Penertiban Penambangan tanpa ijin dan habis ijin.
j. Pendataan Objek dan Subjek pajak.
k. Inventarisasi pengambilan AT.
l. Pembinaan penertiban dan pengambilan AT.
m. Pengawasan dan pengendalian pemakai air bawah tanah.
n. Pengelolaan Sistem Informasi Pertambangan.

Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Kinerja program dalam misi ini antara lain peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dan antar lembaga lainnya, peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, dalam hal penataan peraturan perundang-undangan, capaian kinerjanya antara lain terpenuhinya pengadaan pedoman produk hukum daerah yang baik, meliputi 15 buah perda, 15 buah peraturan bupati, 375 buah keputusan bupati dan 2 buah perjanjian.

Dalam hal peningkatan pelayanan manajemen publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil kepada seluruh masyarakat, serta untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan jumlah perijinan yang diterbitkan sebanyak 2.719 perijinan yang menghasilkan retribusi daerah sebesar 1,09 milyar rupiah lebih.

Kebijakan:

a. Mengembangkan teknologi informasi dalam database pegawai (SIMPEG) sebagai bahan kebijakan kepegawaian.
b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur.
c. Mewujudkan penempatan aparatur sesuai dengan kompetensi.
d. Terciptanya sinergitas pengelolaan administrasi kepegawaian.
e. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
f. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan.
g. Mengembangkan dan menerapkan teknologi dan informasi dalam manajemen pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
h. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
i. Meningkatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien.
j. Menata sistem hukum serta meningkatkan peran dan kapasitas lembaga legislatif.
k. Mewujudkan tertib pelayanan yang profesional dalam mendukung kinerja DPRD Kab. Garut.
l. Mewujudkan demokrasi pemerintahan.

Strategi:

a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian secara terpadu dan akurat.

b. Menetapkan standar kompetensi pekerjaan dan jabatan pegawai negeri.
c. Menetapkan standar pendidikan dan pelatihan aparatur untuk setiap jenis pekerjaan dan jenjang jabatan.
d. Optimalisasi kinerja Majelis Pertimbangan Penilaian Penerapan Disiplin (MP3D).
e. Penetapan standar kualifikasi dan mekanisme dalam penerimaan dan pembinaan pegawai yang komprehensif disertai pengawasan terhadap pelaksanaannya secara rasional dan sistematis.
f. Peningkatan kualitas tata laksana pengawasan kinerja organisasi pemerintah daerah secara komprehensif.
g. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung, SOP serta kualitas SDM aparatur dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
h. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah, disertai pengawasan untuk menekan tingkat kebocorannya.
i. Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi pemerintahan daerah.
j. Penyusunan dan penegakkan produk hukum daerah serta peningkatan kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
k. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah yang berdayaguna dan berhasil guna.
l. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan terhadap anggota DPRD.

m. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/ Wagub, Bupati/ Wabup, Legislatif dan Presiden/ Wapres.

Program Kerja:

a. Program Pendidikan dan Pelatihan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
b. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
f. Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
g. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
h. Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
i. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.
j. Program peningkatan SDM, sarana dan prasarana Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
k. Program penyederhanaan prosedur dan mekanisme pelayanan perijinan.
l. Koordinasi peningkatan peran Pelayanan Perijinan Terpasu Satu Pintu (PPTSP).
m. Peningkatan dan pembenahan sistem administrasi kearsipan PPTSP.

n. Peningkatan kualitas pelayanan informasi perijinan berbasis sistem teknologi informasi.
o. Penanganan pengaduan masyarakat dalam pelayanan perijinan.
p. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
q. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah.
r. Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten dan Kota.
s. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
t. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah.
u. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
v. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
w. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
x. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.
y. Program Pengaturan dan pengawasan Jasa Kontruksi.
z. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
aa. Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.
bb. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
cc. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
dd. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
ee. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan yang mampu mengelola kecamatan sebagai SKPD.

ff. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur/ Wagub, Bupati/ Wabup, Legislatif dan Presiden/ Wapres.

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan sangat penting posisinya dalam menjalankan roda Pemerintahan di Kabupaten Garut. Proses perencanaan sangat menentukan akan keberhasilan suatu pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Bappeda sebagai unsur dari pemerintahan Daerah Kabupaten Garut mempunya peranan yang sangat penting terhadap proses perencanaan tersebut. Bappeda senantiasa meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan serta sangat berpihak terhadap kepentingan rakyat banyak.

Kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan.

Strategi:

a. Pengembangan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif, implementatif dan berkelanjutan.

Program Kerja:

a. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.
b. Pengendalian perencanaan pembangunan.
c. Evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan.
d. Peningkatan koordinasi antar sektor dan antar pemerintahan.

e. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan pihak lain dalam pembangunan.

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Garut senantiasa meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan serta penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan melalui pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, lomba desa, penyusunan profil desa dan kelurahan, pembinaan alokasi dana desa, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Kebijakan:

a. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan.
b. Mewujudkan Desa Membangun.

Strategi:

a. Meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat.
b. Mengoptimalkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan, meningkatkan pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Program Kerja:

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
b. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
d. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
e. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam rangka pemeliharaan keamananan dan ketertiban masyarakat, capaian kinerjanya antara lain meningkatnya penanganan penyakit masyarakat melalui operasi ketentraman dan ketertiban umum serta operasi khusus penyakit masyarakat, pelaksanaan kegiatan gerakan disiplin daerah (gdd), pengamanan unjuk rasa, monitoring dan evaluasi perijinan daerah, pendataan cukai rokok dan tembakau, pembinaan aparatur dalam peningkatan sistem keamanan swakarsa di 42 kecamatan.

Kebijakan:

a. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya.
b. peningkatan pemahaman demokrasi dan penguatan fungsi partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat.
c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politk.
d. Peningkatan peran dan fungsi Partai Politik.

Strategi:

a. Peningkatan pemeliharaan kamtibmas melalui upaya pemberdayaan masyarakat (*community policing*).
b. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.
c. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.

Program Kerja:

a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
e. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

5. Urusan Kearsipan

Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya pemerintahan, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi Pemda Garut. Mengingat arti pentingnya Pemerintah Garut menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal ini terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang kearsipan Daerah.

Kebijakan:

a. Mewujudkan tertib administrasi transparan dan akuntabel.

Strategi:

a. Meningkatkan tertib administrasi kearsipan.
b. Meningkatkan kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip.
c. Meningkatkan kegiatan pemeliharaan secara rutin atau berkala baik sarana maupun sarana kearsipan.
d. Meningkatkan kualitas layanan informasi.

Program Kerja:

a. Perbaiakan sistem Administrasi kearsipan.
b. Penyelamatan, pelestarian arsip daerah.
c. Pemeliharaan secara rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
d. peningkatkan kualitas layanan informasi.

6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Berkenaan dengan penataan administrasi kependudukan, diantaranya telah disusun peraturan daerah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pelayanan pencetakan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga sebanyak 129.330 lembar serta penerbitan kepemilikan akta catatan sipil sebanyak 16.888 akta. Selain itu diterapkannya juga kebijakan-kebijakan, seperti meningkatkan dan mengembangkan tertib administrasi kependudukan, mempermudah proses administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Kebijakan:

a. Meningkatkan dan mengembangkan tertib administrasi kependudukan.
b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur.
c. Meningkatkan pengawasan administrasi kependudukan dan informasi.

Strategi:

a. Peningkatan tata kelola tertib administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi.
b. Peningkatan Kapasitas aparatur.
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana.
d. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen Kependudukan.
e. Peningkatan pengawasan dan penyebaran informasi adminduk.

Program Kerja:

a. Penataan administrasi kependudukan.
b. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
c. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK.
d. Implementasi sistem administrasi kependudukan.
e. Pembentukan dan Penataan sistem koreksi.
f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.
g. Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan.
h. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
i. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
j. Pengembangan database kependudukan.
k. Penyusunan kebijakan kependudukan.

l. Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan.

m. Sosialisasi kebijakan kependudukan.

n. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

o. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

7. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan:

a. Mengoptimalkan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informatika untuk mewujudkan *e-government*.

b. Meningkatkan pelayanan Informasi dengan Media Massa dan Kelompok Informasi Masyarakat.

Strategi:

a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan secara terpadu, efisien, dan transparan.

b. Peningkatan Kerjasama Informasi dengan Media Massa dan Kelompok Informasi Masyarakat.

Program Kerja:

a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi.

b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.

c. Peningkatan Pengolahan Data Elektronik dan Pelayanan Informasi berbasis teknologi informasi.

d. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika.

e. Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika untuk Masyarakat.

f. Fasilitasi, Koordinasi dan Pengembangan Piranti Keras dan Lunak Sistem Informasi Daerah yang terintegrasi.
g. Peningkatan perangkat Persandian dan Telekomunikasi Daerah.
h. Peningkatan SDM Persandian dan Telekomunikasi.
i. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.
j. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
k. Sosialisasi kebijakan, penyuluhan dan Diseminasi Informasi.
l. Peningkatan sarana pendukung pelayanan informasi kepada masyarakat.
m. Peningkatan kualitas SDM dalam penyebarluasan informasi.
n. Pemberdayaan Media Massa dan Kelompok Informasi Masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang

1. Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi program dalam misi keempat ini diantaranya berkaitan dengan capaian kinerja di sektor Kebinamargaan dengan gambaran capaian kinerja, antara lain tercapainya kondisi jalan baik mencapai 275,45 km, atau meningkat 0,2% bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 273,82 km. Sementara itu, kondisi jalan sedang tercapai 209,18 km atau menurun 13,21% bila dibandingkan pada tahun 2008 yang mencapai 318,65 km. Adapun kondisi jalan rusak berat sepanjang 344,13 km atau meningkat 13,01% apabila dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya mencapai 236,29 km.

Selanjutnya pada sektor pengelolaan sumber daya air dan irigasi, telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan intensitas tanam padi sawah khususnya pada daerah irigasi, serta mengupayakan pengelolaan infrastruktur sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi luas areal banjir, dan pengendalian banjir. Keberhasilan program dan kegiatan dititikberatkan pada :

1) Penyediaan air baku/ air bersih untuk masyarakat dan penelitian sumber daya air yang diindikasikan dengan peningkatan pembangunan instalasi air dan perencanaan pengukuran daerah irigasi.
2) Penanganan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi perdesaan, yang diindikasikan meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk mengairi lahan pertanian dan terpeliharanya pola tanam.
3) Meningkatkan kapasitas kemampuan sungai dan terkendalinya luapan air/longsor, yang diindikasikan berfungsinya sarana dan prasarana air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air baku.

Gambaran pencapaian kinerjanya, dapat dilihat dari kondisi jaringan irigasi sepanjang tahun 2009, yaitu saluran daerah irigasi pemerintah dalam kondisi baik mencapai 39,46% atau dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 27,89%, kondisi rusak ringan mencapai 38,10% atau menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 43,54%, kondisi rusak berat mencapai

22,45% atau menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 28,57%.

Sementara itu, saluran daerah irigasi desa berada dalam kondisi baik mencapai 52,05%, atau meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 51,08%. Kondisi rusak ringan mencapai 14,79%, atau menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 14,9%, kondisi rusak berat mencapai 33,16% atau menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 34,02%.

Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang transportasi dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan yang dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah, yang diindikasikan pada kelancaran dan keselamatan di jalan melalui pengadaan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan rambu pendahulu petunjuk jurusan, serta meningkatnya pelayanan bagi penyedia dan pengguna jasa transportasi.

Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman, telah memberikan kontribusi dalam meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perdesaan sebesar 0,71% yaitu dari 1.089.355 jiwa pada tahun 2008 menjadi 1.097.090 jiwa pada tahun 2009, sedangkan untuk pelayanan air bersih perkotaan mengalami peningkatan sebesar 6,1% dari 196.380 jiwa menjadi 208.371 jiwa, meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan,

meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan, meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, serta meningkatnya kondisi perumahan yang sehat dan layak huni.

Kebijakan:

a. Meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
b. Meningkatkan pengelolaan prasarana jalan dan jembatan.
c. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang memadai untuk menunjang kegiatan pertanian, industri dan kebutuhan domestik dengan memperhatikan upaya konservasi dan pengendalian daya rusak air.

Strategi:

a. Peningkatan jalan dan jembatan pada ruas vertikal menuju jalan lintas selatan, Jalur-jalur Produksi, Kawasan strategis.
b. Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan kabupaten pada ruas strategis, jalur produksi; dan pusat pelayanan.
c. Penyusunan data dan Informasi Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Jalan.
d. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
e. Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak.
f. Peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
g. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dalam pengelolaan jaringan irigasi.

h. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok di wilayah rawan air, rawan defisit air, desa tertinggal dan wilayah padat pemukiman.
i. Meningkatkan konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

Program Kerja:

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
b. Rehabilitasi / Pemeliraan Jalan dan Jembatan.
c. Inpeksi kondisi jalan dan jembatan.
d. Pembangunan Sistim imformasi data base jalan dan jembatan.
e. Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
f. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainya.
g. Operasi dan Pemelihaaran Jaringan Irigasi.
h. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
i. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
j. Pengendalian Banjir.
k. Pembebasan Tanah di Copong.
l. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
m. Inventarisasi Kondisi Jaringan Irigasi.
n. Penertiban Ijin Pemakaian Tanah/Jembatan Irigasi.
o. Pelatihan OP Jaringan Irigasi.

p. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
q. Pembinaan P3A/GP3A.
r. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
s. Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah.
t. Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.
u. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa.
v. Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
w. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya.
x. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya.
y. Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau.
z. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
aa. Pengendalian Banjir.
bb. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali.
cc. Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai.
dd. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai.

2. Urusan Perhubungan

Peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang transportasi dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan yang dititikberatkan untuk menunjang kelancaran roda perekonomian daerah, yang diindikasikan pada kelancaran dan

keselamatan di jalan melalui pengadaan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan dan rambu pendahulu petunjuk jurusan, serta meningkatnya pelayanan bagi penyedia dan pengguna jasa transportasi. Selain itu ditingkatkan pula pembangunan-pembangunan infrastruktur yang sangat mendukung akan berjalannya roda perekonomian Kabupaten Garut, seperti pembangunan dan perbaikan jalan-jalan daerah.

Kebijakan:

a. Mengembangkan infrastruktur perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.

Strategi:

a. Mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional.
b. Menyediakan prasarana & sarana perhubungan.
c. Mewujudkan pelayanan prima perijinan & jasa perhubungan.
d. Mewujudkan tertib lalu lintas melalui penataan manajemen transportasi dan sosialisasi.
e. Meningkatkan tata kelola dan pengawasan.

Program Kerja:

a. Pengikutsertaan aparatur pada Diklat Teknis fungsional dan struktural.
b. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
c. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
d. Rehabiitasi/ Pemeiharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.
e. Rehabiitasi/ Pemeiharaan prasarana alat pengujian kendaraan bermotor.

f. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.
g. Pembinaan kepada penyedia jasa dan pengguna jasa perhubungan.
h. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan.
i. Peningkatan kualitas pelayanan Perhubungan.
j. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.
k. Peningkatan Pelayanan Angkutan.
l. Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
m. Pengembangan jaringan komunikasi.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pemerintah Kabupaten Garut senantiasa memperhatikan urusan energy dan sumber daya mineral. Sadar akan kekayaan alam yang sangat melimpah, sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Garut sangat memperhatikan dan mengawasi kekayaan alam tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Disamping itu pemerintah sedang berupaya untuk menghasilkan suatu sumber energi baru yang lebih ramah lingkungan dan bersifat terbarukan.

Kebijakan:

a. Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan perdesaan dan rumah tangga.
b. Meningkatkan ketersediaan energi alternatif yang ramah lingkungan.
c. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengambilan air tanah.

Strategi:

a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan PLN.
b. Penyusunan kompilasi peta jaringan listrik pedesaan.

c. Penyusunan potensi dan rencana pengggunaan energi alternatif.
d. Pengendalian perijinan pengambilan air tanah.

Program Kerja:

a. Pembinaan dan Pengembangan bidang Energi dan Ketenagalistrikan.
b. Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Energi Baru dan Terbarukan.
c. Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Konservasi Energi.
d. Penyusunan dan Pemetaan daerah rawan bencana alam geologi gerakan tanah.
e. Pengembangan dan pengelolaan air tanah.

4. Urusan Perumahan

Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman, telah memberikan kontribusi dalam meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perdesaan sebesar 0,71% yaitu dari 1.089.355 jiwa pada tahun 2008 menjadi 1.097.090 jiwa pada tahun 2009, sedangkan untuk pelayanan air bersih perkotaan mengalami peningkatan sebesar 6,1% dari 196.380 jiwa menjadi 208.371 jiwa, meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan, meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan, meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, serta meningkatnya kondisi perumahan yang sehat dan layak huni.

Kebijakan:

a. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar Permukiman dan perumahan.

b. Meningkatkan kualitas kontruksi bangunan Gedung pemerintah dan masyarakat.
c. Meningkatkan kinerja penataan perkotaan dan perdesaan.

Strategi:

a. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan Air limbah perkotaan.
b. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perdesaan.
c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan.
d. Peningkatan Pelayanan Perencanaan Kontruksi bangunan Gedung.
e. Peningkatan penataan Kawasan Perkotaan.

Program Kerja:

a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Wilayah Perkotaan.
b. Peningkatan Cakupan pelayanan air minum di wilayah Perkotaan.
c. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pelayanan air minum perkotaan.
d. Pengembangan dan pengelolaan air limbah perkotaan.
e. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Wilayah Perdesaan.
f. Akselerasi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 2015.
g. Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah.
h. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah.
i. Penyusunan Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum.

j. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
k. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
l. Pembangunan lingkungan sehat permukiman dan perumahan.
m. Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
n. Pengembangan Perumahan.
o. Bantuan Teknis Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
p. Peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
q. Penataan Perkotaan.
r. Pengelolaan areal pemakaman.

5. Urusan Transmigrasi

Berkaitan dengan urusan kependudukan, pemerintah senantiasa berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya dengan melaksanakan program transmigrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, dalam rangka penyebaran penduduk dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencari penghidupan yang lebih layak di daerah lain di Indonesia. Beberapa program Pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka mendukung program transmigrasi diantaranya dengan melaksanakan pelatihan Translok yang berlokasi di Arinem Kecamatan Pakenjeng dan Cimahi Kecamatan Caringin, kerjasama antar wilayah dengan Kabupaten Tojomina Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu serta penempatan calon transmigran keluar Jawa sebanyak 63 KK.

Kebijakan:

a. Penataan penduduk sehingga tercapai keserasian antara daya tampung penduduk dengan daya tampung lingkungan.

Strategi:

a. Menciptakan kawasan transmigrasi menjadi kawasan cepat tumbuh terciptanya penyebaran transmigrasi kewilayah potensi cepat tumbuh.

Program Kerja:

a. Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
b. Transmigrasi Lokal.

6. Urusan Penataan Ruang

Program dan kegiatan bidang penataan ruang telah memberikan kontribusi dalam perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah, struktur tata ruang, rencana pemanfaatan ruang, baik kawasan terbangun atau budidaya, maupun kawasan lindung, rencana pengembangan sarana dan prasarana dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketersediaan basis data melalui visualisasi dalam peta-peta digital yang bermanfaat untuk perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan infrastruktur serta analisis potensi wilayah.

Kebijakan:

a. Peningkatan peran dan fungsi penataan ruang.
b. Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang.

Strategi:

a. Membuat kebijakan produk rencana tata ruang.
b. Perencanaan tata ruang untuk kawasan-kawasan strategis.
c. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi.
d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang.
e. Memantapkan peran koordinasi perencanaan di tingkat Kabupaten Garut.

Program Kerja:

a. Penetapan kebijakan untuk RTRW dan Rencana rinci.
b. Penyusunan rencana tata ruang kawasan pusat perekonomian, pariwsata dan pemerintahan.
c. Pengembangan dan updating Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD).
d. Pemanfaatan ruang.
e. Pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Garut senantiasa mewujudkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem, beberapa sasaran pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dicapai sampai dengan tahun 2009 diantaranya menurunnya jumlah lahan kritis menjadi seluas 31.554 hektar dari seluas 34.723 hektar pada tahun 2008; terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk, DAS Cikaengan dan DAS Cilaki; menurunnya tingkat pencemaran air; meningkatnya kawasan hutan kota dan jalur hijau; meningkatnya

cakupan pelayanan dan daya angkut persampahan; meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan (mitigasi) bencana alam; serta upaya mencapai kawasan lindung sesuai dengan RTRW jawa barat.

Capaian kinerja program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dilihat dari penyelenggaraan pemantauan kualitas lingkungan, terpeliharanya sarana dan prasarana Ipal I dan II dalam pengelolaan limbah B3, sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup dan K3, penataan kota sehat di empat kecamatan, pengujian kualitas limbah cair, pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam pengendalian pencemaran berupa biogas sebanyak 80 unit, sumur resapan sebanyak 10 buah dan pembuatan lubang Biopori sebanyak 1300 lubang, tersedianya alat komposter (Takakura) sebanyak 120 unit untuk rumah tangga sehingga dapat mereduksi timbulan sampah organik skala rumah tangga, tersedianya alat-alat laboratorium sebanyak 26 jenis alat yang diharapkan dapat mendeteksi tingkat pencemaran, penanaman pohon sebanyak 6000 pohon di kawasan konservasi serta terlaksananya sosialisasi mengenai bahaya pencemaran udara dan merokok bagi kesehatan.

Penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Garut dalam bidang lingkungan hidup adalah diraihnya kembali piala Adipura tahun 2009 kategori kota kecil untuk ketiga kalinya selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan ini merupakan penghargaan tingkat nasional yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan hijau.

Sementara itu dalam pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan volume timbunan sampah pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan sebesar 3,25% dari volume timbunan sampah 955 meter kubik per hari pada tahun 2008 menjadi 986 meter kubik per hari pada tahun 2009. Untuk menanggulangi kapasitas sampah Kota Garut tersebut telah dilakukan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, pemeliharaan operasional tempat pembuangan sementara serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Kebijakan:

a. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
b. Kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu.
c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup.
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi:

a. Penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan.

b. Optimalisasi kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan secara terpadu.
c. Peningkatan kemampuan masyarakat dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan hidup.
d. Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Program Kerja:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
c. Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
f. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
h. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
i. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.
j. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan.

8. Urusan Kehutanan

Berkenaan dengan pembinaan hutan, produksi hutan dan pengelolaan lingkungan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, mencapai hasil berupa produksi hutan rakyat pada tahun 2009 sebanyak

38.580,95 meter kubik meningkat dari tahun 2008 sebanyak 17.796,33 meter kubik. Selain itu dilaksanakan rehabilitasi hutan produksi di 9 BKPH seluas 112,10 hektar.

Kebijakan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) dalam bentuk sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) pada tahun 2009 dilaksanakan pengembangan di sembilan desa pada lima kecamatan, dengan komoditas tanaman kopi. Adapun pengembangan aneka usaha kehutanan berupa sutera alam, jamur kayu, lebah madu, anyaman, burung walet dan meubeler. Keberhasilan kegiatan rehabilitasi lahan kritis menjadi seluas 31.554 hektar tidak terlepas dari pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangannya.

Kebijakan:

a. Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.
b. Meningkatkan penanganan lahan kritis dan fungsi kawasan lindung.
c. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Strategi:

a. Penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui penanaman pohon.
b. Penanganan lahan kritis melalui penanaman pohon.
c. Perlindungan hutan melalui peningkatan kesadaran masyarakat sekitar hutan.

Program Kerja:

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
b. Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
c. Rehabilitasi lahan kritis.
d. Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan.

4.2 Tujuan RPJMD

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kabupaten Garut, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah *(goal)* yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi yang telah ditetapkan. Secara umum terdapat 4 (empat) tujuan dasar dalam pembangunan Kabupaten Garut 5 (lima) tahun mendatang, yaitu:

1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Sosial**.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan agama merupakan tugas utama pemerintah. Kualitas hidup masyarakat, oleh UNDP diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks paritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan

adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

2. Meningkatkan perekonomian dan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidakstabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar pemerintah daerah ke depan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Indikator keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkelanjutan

Penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan merupakan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan. Pertama, mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Kedua, menegakkan *rule of law* (kekuasaan

hukum) secara adil. Ketiga, menciptakan transparansi dalam hal arus informasi. Keempat, membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agar setiap keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga¬lembaga stake holder. Kelima, mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam melayani setiap kebutuhan stakeholder/warga negara. Keenam, seluruh komponen pemerintahan harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat. Ketujuh, mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat. Dan kedelapan, setiap pimpinan mempunyai visi yang strategis dalam mencapai *good governance* dengan mengembangkan kualitas SDM di semua bidang.

4. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Sesuai dengan Peruntukannya

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan

keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Indikator keberhasilan tujuan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan adalah penanganan lahan kritis. Lahan kritis dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul. Kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktifnya lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, baik longsor maupun banjir. Sebagian besar lahan kritis terjadi akibat adanya alih fungsi hutan yang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Di dalam tujuan dari RPJMD juga terdapat strategi pembangunan daerah, yang merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan program-program prioritas pembangunan kepala daerah disesuaikan dengan visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2009-2014, strategi pembangunan daerah diwujudkan dalam bentuk fokus sasaran atau prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Fokus sasaran atau prioritas pembangunan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan setiap tahunnya, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Fokus sasaran pembangunan atau prioritas pembangunan dalam setiap tahunnya menggambarkan makna urgensi pemecahan permasalahan strategis. Konsekuensi logis dari adanya tahapan dan prioritas pembangunan dalam

RPJMD ini adalah dalam penyusunan rencana anggaran pembangunan daerah komposisi anggaran belanja program kegiatan perlu disesuaikan dengan prioritas bidang pembangunan pada masing-masing tahapan. Hal ini mengandung makna bahwa, anggaran belanja program kegiatan yang mendukung prioritas tersebut perlu mendapat porsi lebih guna tercapainya sasaran yang ditetapkan.

Perlu dijelaskan bahwa prioritas pembangunan tahunan pada RPJMD ini dimulai pada tahun 2010 dan diakhiri pada tahun 2014. Hal ini didasarkan pada skenario pembangunan yang dimulai pada tahun 2010 karena pelaksanaan Tahun Anggaran 2009 masih menggunakan dasar hukum RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2006-2009. Sedangkan untuk tahun 2014 merupakan tahun transisi berisi program-program transisi disebabkan pergantian kepala daerah.

4.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada Ketentuan Perundangan yang berlaku saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dalam operasional pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya komponen keuangan daerah meliputi Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah tersebut.

Kebijakan keuangan daerah perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu, beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Pemenuhan standar pelayanan publik minimal di daerah;
2. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
3. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 17 tahun 2003 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
4. Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah;
5. Implementasi strategi *pro growth* (*pro investment*), *pro job*, dan *pro poor* di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan Garut yang Mandiri dalam Ekonomi, Adil dalam Budaya dan Demokratis dalam Politik Menuju Ridlo Allah SWT, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalian sumber pembiayaan serta melakukan efisiensi belanja disertai dengan meningkatkan keselarasan antara fungsi perencanaan dengan penganggaran dan mengefektifkan fungsi pengawasan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Optimalisasi perlu dilakukan pada dana penerimaan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Garut. Demikian halnya dengan dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Garut. Untuk itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Berkenaan dengan upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penguatan ekonomi masyarakat, perlu dikembangkan model pembiayaan *public-private partnership* dengan mendorong peningkatan partisipasi swadaya masyarakat.

Dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, kebijakan keuangan daerah juga perlu mempertimbangkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2010-2014 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,7%; tahun 2010 sebesar 5,99%; tahun 2011 sebesar 6,79%; dan tahun 2012 sebesar 5,94%, tahun 2013 sebesar 5,96% dan tahun 2014 sebesar 5,57%. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sebesar sebesar Rp.3,30 triliun tahun 2009; sebesar Rp.3,71 triliun tahun 2010; sebesar Rp.4,20 triliun tahun 2011; sebesar Rp.4,72 triliun tahun 2012; sebesar Rp.5,30 triliun tahun 2013 dan sebesar Rp.5,95 triliun tahun 2014.

Anggaran daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai visi daerah dan instrumen yang membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang terus berkembang, anggaran daerah yang disusun agar benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat dengan berpegang pada pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif melalui paradigma anggaran daerah yang diperlukan, yaitu :

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;

3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaraan daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait;
6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan melalui: a) pengelolaan yang lebih baik dalam bidang yang sudah ada, terutama Pariwisata (banyak gunung, upacara adat, dll), Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame; b) mencari inovasi pendapatan daerah, seperti pengelolaan air, pengelolaan bidang lain yang terkait dengan wisata, tambang, pengelolaan sumber daya alam dan mineral yang tidak merusak lingkungan, dll; dan c) meninjau ulang beberapa ketetapan pajak dan retribusi daerah;
7. Anggaran Belanja agar mengedepankan asas efisiensi, dan menghindari double anggaran, tidak rasional, cenderung boros, dan yang tidak peka terhadap krisis dan kondisi kemiskinan masyarakat;
8. Pelaksanaan kebijakan anggaran akan makin didekatkan pada desa dan kecamatan.

Oleh karenanya, arah kebijakan keuangan daerah dititik beratkan pada:

A. Kebijakan pendapatan keuangan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali

agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, Peningkatan Dana Perimbangan serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

B. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan dan sangat bergantung pada penerimaan negara. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah perlu memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah.

C. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis pembangunan yang memiliki nilai tambah *(value-added),* sesuai capaian target visi dan misi lima tahun ke depan.

D. Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (penerimaan pembiayaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan

pengeluaran pada pos-pos pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Komponen pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

4.3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut selama kurun waktu 6 tahun (2004-2009), rata-rata pertumbuhan per

tahun mengalami kenaikan sebesar 18,29%, sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.2
Perkembangan Rencana dan Realisasi PAD Kabupaten Garut
Tahun 2004-2009

Tahun	Rencana		Realisasi		
	PAD	Pertum buhan	PAD	Pertum buhan	Capaian
2004	40.129.293.242,89		40.545.879.655,67		101,04
2005	49.861.740.873,00	24,25	50.323.323.285,00	24,11	100,93
2006	62.543.259.126,00	25,43	62.952.615.115,00	25,09	100,65
2007	79.510.324.318,00	27,13	76.880.011.092,00	22,12	96,69
2008	88.587.228.645,00	11,42	83.306.424.295,00	8,36	94,04
2009* (rencana)	91.428.550.187,00	3,21			
Rata-rata Per Tahun		**18,29**		**19,92**	**98,67**

Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2008 (Perda APBD 2009 Murni)

Berdasarkan tabel 4.2, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2004-2008 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 19,82%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan realisasi PAD yang dicapai pada tahun yang sama memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam realisasi pencapainnya. Hal ini berarti bahwa diperlukan optimalisasi dan pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah yang ditempuh melalui penetapan kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang disertai dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Memperhatikan kemampuan keuangan dari PAD Kabupaten Garut dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 6,38% (Tabel 4.3), dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut masih sangat rendah dan masih sangat tergantung pada jumlah Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 4.3
Perkembangan Realisasi PAD Dibandingkan dengan APBD
Kabupaten Garut Tahun 2004 – 2008

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan %	Jumlah Pendapatan	Proporsi PAD %
2004	40.545.879.655,67		651.014.630.395,67	6,23
2005	50.323.323.285,00	24,11	701.732.953.600,00	7,17
2006	62.952.615.115,00	25,10	1.049.101.071.513,00	6,00
2007	76.880.011.092,00	22,12	1.202.655.284.733,00	6,39
2008	83.306.424.295,00	8,36	1.364.183.603.375,52	6,11
Rata-rata Realisasi Per Tahun		**19,92**		**6,38**

Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Realisasi APBD

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sebetulnya sumber penerimaan dominan bagi PAD Kabupaten Garut adalah dari Retribusi Daerah yang berkontribusi sebesar 79,63% terhadap PAD, disusul penerimaan dari Pajak Daerah mencapai 10,94%. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan pajak dan retribusi memiliki kepastian tinggi, dipungut berdasarkan landasan legal yang kuat dan terkait dengan pemberian layanan tertentu.

Tabel 4.4
Perkembangan Realisasi Komponen PAD
Tahun 2004 – 2008

Tahun	Sumber PAD				JUMLAH PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
2004	4.936.516.015	30.610.566.067	992.460.366,00	4.006.337.208	40.545.879.656
2005	6.354.552.060	40.613.195.218	1.141.334.734,00	2.214.241.273	50.323.323.285
2006	6.472.578.095	47.907.857.329	1.338.251.704,00	7.233.927.987	62.952.615.115
2007	7.820.442.301	63.606.796.091	1.436.088.314,00	4.016.684.386	76.880.011.092
2008*	7.880.568.811	69.248.672.472	1.320.618.096,00	4.856.564.916	83.306.424.295,00

Tahun	Sumber PAD				JUMLAH PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
% Rata2 Pertumb /Th	**13,04**	**23,07**	**7,88**	**39,60**	**19,92**
% Rata2 Proporsi /Th	**10,94**	**79,63**	**2,06**	**7,37**	**100,00**

Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Realisasi APBD

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Garut termasuk masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat yang terlalu besar. Rata-rata proporsi PAD terhadap Penerimaan APBD adalah 6,38%, Dana Perimbangan sekitar 88,60% dan pendapatan lain yang sah sekitar 5,02% sebagaimana terdapat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Total Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Garut
Tahun 2004-2008

Tahun	PAD	Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Jumlah Realisasi Pendapatan	Pertum buhan (%)
2004	40.545.879.655,67	565.971.387.143	44.497.363.597	651.014.630.395,67	
2005	50.323.323.285,00	618.422.630.315	32.987.000.000	701.732.953.600,00	7,79
2006	62.952.615.115,00	978.396.385.248	7.752.071.150	1.049.101.071.513,00	49,50
2007	76.880.011.092,00	1.063.094.403.170	62.680.870.471	1.202.655.284.733,00	14,64
2008	83.306.424.295,00	1.176.755.778.323,52	104.121.400.757	1.364.183.603.375,52	12,99
Pertumbuhan Per Tahun (%)	19,92	21,71	168,08	21,34	21,34
Proporsi Per Tahun (%)	6,38	88,60	5,02	100,00	

Sumber : APBD Kab. Garut (Januari 2009)

Struktur penerimaan yang belum kokoh ini menyimpan peluang besar untuk mengalami keguncangan, apabila Dana Perimbangan yang diperoleh tidak terlalu besar. Seandainya penerimaan Dana Perimbangan tersebut mengalami penurunan atau relatif konstan, maka hal ini dapat menjadi ancaman bagi kapasitas pembangunan Kabupaten Garut. Untuk

itu, sebagai upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, penguatan porsi PAD dalam struktur penerimaan daerah merupakan suatu hal yang mendesak yang perlu menjadi perhatian seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Garut agar kapasitas pembangunan daerah tetap terjaga. Kabupaten Garut dengan segenap potensi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya berpeluang besar untuk memperoleh pendapatan dari pengelolaan SDA tersebut, diantaranya adalah dana bagi hasil dari sumber energi panas bumi kawah Darajat yang dikelola PT Chevron Geothermal Indonesia (CGI), disamping kemungkinan untuk memperoleh hasil dari pengelolaan perkebunan besar di Kabupaten Garut yang hingga saat ini baru diperoleh berupa pajak PBB perkebunan. Disamping itu, potensi lainnya yang dapat dikembangkan yaitu pengelolaan sumber pertambangan di wilayah selatan yang diperlukan kehati-hatian dan kearifan dalam pengelolaannya terkait masalah kelestarian lingkungan dan penetapan kawasan lindung di daerah tersebut.

Di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, disebutkan pembagian yang diterima oleh pemerintah daerah dari penerimaan negara untuk hasil pengelolaan panas bumi, yaitu:

1. Ayat (5) Penerimaan Negara Berupa Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang pembagiannya sebagai berikut:
   a. penerimaan negara berupa pajak, pembagiannya ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

b. penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Tetap dan Iuran Produksi, pembagiannya ditetapkan dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah.

2. Ayat (6) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dibagi dengan perincian sebagai berikut:
   a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam belas persen);
   b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen);
   c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32% (tiga puluh dua persen).

Untuk itu diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong penggalian sumber-sumber PAD yang berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut, mengingat betapa besar manfaat yang dapat diperoleh dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi, selama tahun 2004-2008 menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya, serta memiliki prospek yang cukup baik untuk lebih ditingkatkan

seiring dengan meningkatnya Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam.

DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang. Berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari Tahun ke Tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undang-undang bersifat transparan.

Berdasarkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Garut selama tahun 2004-2008 cenderung terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Garut dapat dikategorikan masih sangat rendah dan masih bergantung pada Dana Alokasi Umum(DAU). Disamping itu, Kabupaten Garut mendapat dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama Tahun 2004 sampai dengan Tahun

2008 sebagaimana Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Perkembangan Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2004-2009

Tahun	Rencana	Pertum buhan %	Realisasi	Pertum buhan %
2004	558.691.967.777,12		565.971.387.143,00	
2005	605.385.738.421,01	8,36	618.422.630.315,00	9,27
2006	965.228.188.786,34	59,44	978.396.385.248,00	58,21
2007	1.054.463.085.773,00	9,24	1.063.094.403.170,00	8,66
2008	1.174.418.723.804,00	11,38	1.176.755.778.323,52	10,69
2009 (rencana)	1.188.646.099.000,00	1,21		
Rata-rata Per-Tahun		**17,93**		**21,71**

Sumber : Perda Perhitungan APBD Tahun 2004 -2008 dan Target Murni Tahun 2009.

Perkembangan target dari dana perimbangan secara total selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2004-2009) rata-rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 17,93%. Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2004-2008 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 24,08%. Realisasi kontribusi dana perimbangan terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata- rata sebesar 88,60%, komponen terbesar dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum sebesar 83%.

Tabel 4.7
Perkembangan Realisasi Komponen Dana Perimbangan
Tahun 2004-2008

Tahun	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Dana Perimbangan dari Propinsi	Jumlah
2004	38.511.335.403	490.611.000.000	2.500.000.000	34.349.051.740	565.971.387.143
2005	44.283.881.723	520.630.992.000	16.990.000.000	36.517.756.592	618.422.630.315
2006	56.482.339.351	830.714.900.000	38.749.900.000	52.449.245.897	978.396.385.248
2007	79.974.362.138	911.801.000.000	71.319.041.032	62.680.870.471	1.125.775.273.641
2008	78.022.192.323,52	1.002.247.586.000	96.486.000.000	104.121.400.757	1.280.877.179.080,52
% Rata2 Pertumb /Tahun	20,42	21,34	206,75	24,97	24,08
Rata-Rata Proporsi	6,59	83	4,2	5,78	100,00

Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Realisasi APBD

Perkembangan realisasi total pendapatan Kabupaten Garut yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu 2004-2008 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif dengan rata-rata sebesar 21,34% per tahun dan kontribusinya terhadap Jumlah Pendapatan dan Pembiayaan rata-rata sebesar 97,69% per tahun sebagaimana Tabel 4.8. Capaian peningkatan pendapatan ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang relatif stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 4.8
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kabupaten Garut
Tahun 2004 – 2008

Tahun	Pendapatan	Pertum buhan %	Pendapatan dan Pembiayaan	Proporsi %
2004	651.014.630.395,67		660.936.819.781,70	98,50
2005	701.732.953.600,00	7,79	734.145.904.281,00	95,58
2006	1.049.101.071.513,00	49,50	1.059.049.299.625,83	99,06
2007	1.202.655.284.733,00	14,64	1.226.768.674.332,83	98,03
2008	1.364.183.603.375,52	13,43	1.402.154.304.000,52	97,29
Rata-rata per Tahun		**21,34**		**97,69**

Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Realisasi APBD

Berkenaan dengan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah / Asset Daerah, sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Aset Daerah atau Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar serta memiliki azas-azas fungsional, kepastian hukum, transfaran, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pemanfaatan / penggunausahaan Aset Daerah merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan asli daerah

yang dapat dijadikan potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah secara optimal. Disamping itu pula Asset daerah merupakan bahan dalam penyusunan Laporan Neraca Daerah yang hingga saat ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Untuk itu Asset Daerah perlu dioptimalisasikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, kepastian hukum dan adanya kepastian nilai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah dari Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah selama tahun anggaran 2004 – 2008 mengalami pertumbuhan yang sangat berfluktuatif dengan rata – rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,01% dan 6,20% dengan rata-rata pendapatan sebesar 103,27% dan 123,61%. Rincian capaian target pendapatan dari Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.9
Capaian Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No Urut	Tahun Anggaran	Target Pendapatan	Realisasi	Persentase	Pertumbuhan
1	2004	497.754.963	532.014.310	106,88%	4,83
2	2005	540.244.963	524.476.485	97,08%	5,32
3	2006	608.983.459	613.672.650	100,77%	5,12
4	2007	219.058.496	233.781.675	106,72%	4,84
5	2008	264.674.700	277.655.630	104,90%	4,92
	Rata-rata pertumbuhan per tahun			103,27%	5,01

Sumber : Seksi Pembukuan DPPKA Kab.Garut 2009 ,

Rencana Peningkatan pengelolaan asset daerah atau barang milik

daerah diarahkan kepada pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah melalui sewa menyewa tanah milik Pemerintah Daerah, kerjasama melalui Bangun Serah Guna (BSG) atau Bangun Guna Serah (BGS) dengan target capaian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Proyeksi Capaian Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah
Tahun 2009 – 2014

No Urut	Tahun Anggaran	Target Pendapatan	Pertumbuhan
1	2009	280.555.182,00	6
2	2010	311.416.252,02	11
3	2011	348.786.202,26	12
4	2012	394.128.408,56	13
5	2013	449.306.385,75	14
6	2014	516.702.343,62	15

Sumber : DPPKA Kab.Garut 2009

4.3.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah juga diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui

prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Garut selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2004-2009) mengalami kenaikan yang berfluktuatif dengan rata-rata per tahun sebesar 17,37%, sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2004-2008 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 22,12% sebagaimana tabel 4.11.

Tabel 4.11
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Garut
Tahun 2004-2009

Tahun	Target Belanja	Pertum buhan %	Realisasi Belanja	Pertum buhan %	Capaian (%)
2004	630.806.413.899,32		629.577.233.915,00		99,81
2005	708.606.750.545,01	12,33	712.435.271.800,17	13,16	100,54
2006	1.024.086.634.030,17	44,52	1.021.399.722.467,00	43,37	99,74
2007	1.212.129.905.597,00	18,36	1.185.778.461.539,00	16,09	97,83
2008	1.403.107.774.645,00	15,76	1.374.050.678.868,00	15,88	97,93
2009 *)	1.345.088.104.296,00	(4,14)			
Rata-rata Per Tahun		**17,37**		**22,12**	**99,01**

Sumber : Perda APBD Tahun 2004 -2008 dan Perda APBD 2009 (Murni)

Untuk rata-rata proporsi perkembangan realisasi alokasi belanja daerah terhadap Jumlah Belanja dan Pembiayaan APBD sebesar 99% per Tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Perkembangan Realisasi Alokasi Belanja Daerah Tahun 2004 - 2009
Dibandingkan dengan APBD Tahun 2004– 2008

Tahun	Belanja	Pertumbuhan %	Belanja dan Pembiayaan	Proporsi%
2004	629.577.233.915,00		645.523.869.101	97,53
2005	712.435.271.800,17	13,16	724.241.611.289,17	98,37
2006	1.021.399.722.467,00	43,37	1.035.307.777.012,00	98,66
2007	1.185.778.461.539,00	16,09	1.188.797.973.707,00	99,75
2008	1.374.050.678.868,00	15,88	1.384.060.259.692,00	99,28
2009 *)	1.345.088.104.296,00	(3,01)	1.347.738.104.296,00	99,80

Tahun	Belanja	Pertumbuhan %	Belanja dan Pembiayaan	Proporsi%
Rata-rata per Tahun		**17,28**		**98,90**

Sumber : Data Tahun 2004 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD, Tahun 2008 Realisasi APBD dan Tahun 2009 Rencana APBD Murni.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Garut selama kurun waktu 3 tahun (2004 – 2006), rata-rata pertumbuhan per tahun belanja SKPD untuk belanja administrasi umum sebesar 12,10%, dengan proporsi per tahun sebesar 71,32%, belanja SKPD untuk belanja Operasi Pemeliharaan dan Modal (OP & Modal) rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 95,83% dengan proporsi per tahun sebesar 16,24%. Sementara untuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan mengalami rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 65,87% dengan proporsi per tahun sebesar 11,24%, dan belanja tidak tersangka mengalami rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 87,06% dengan proporsi per tahun sebesar 1,20%. Perkembangan rincian belanja tahun 2004-2006 terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13
Perkembangan Rincian Anggaran Belanja Tahun 2004 s.d 2006

No.	Uraian Komponen Belanja	Tahun Anggaran			Pertumbuhan /Tahun (%)	Proporsi /Tahun (%)
		2004	2005	2006		
1.	Belanja Administrasi Umum	507.124.842.962	510.102.201.492	630.556.248.090	12,10	71,32
2.	Belanja OP & Modal	69.084.701.658	98.145.679.058	244.963.386.253	95,83	16,24
3.	Belanja Bagi Hasil dan BanT. Keuangan	50.136.497.968	87.481.869.995	137.566.999.687	65,87	11,24
4.	Belanja Tidak Tersangka	4.460.371.310	12.877.000.000	11.000.000.000	87,06	1,20
	Jumlah Belanja	**630.806.413.899**	**708.606.750.545**	**1.024.086.634.030**	**28,43**	**100**

Sumber : BPKD Kab. Garut Tahun 2004-2006 (Anggaran Perubahan)

Sementara untuk tahun 2007-2009 dengan diberlakukannya

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur komponen belanja daerah mengalami perubahan, sesuai Pasal 37 Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja daerah terbagi atas belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Anggaran belanja langsung tahun 2007- 2009 mengalami pertumbuhan sebesar -13,02% dengan proporsi sebesar 31,23%, sementara anggaran belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sebesar 15,72% dengan proporsi sebesar 68,77%.

Tabel 4.14
Perkembangan Rincian Anggaran Belanja Tahun 2007-2009

URAIAN	2007 (Angg. Perubahan)	2008 (Angg. Perubahan)	2009 (Angg. Murni)	Pertumbuhan (%)	Proporsi (%)
Belanja Daerah					
Belanja Tidak Langsung	**771.270.523.469,20**	**926.339.815.102**	**1.031.323.664.723**	**15,72**	**68,77**
Belanja Pegawai	600.214.827.399	746.755.233.845	903.051.531.414	22,67	56,63
Belanja Hibah	-	37.105.836.620	4.000.000.000	(89,22)	1,47
Belanja Bantuan Sosial	101.726.929.470	36.107.544.637	54.311.249.249	(7,05)	5,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	51.851.708.000	104.371.200.000	65.847.419.076	32,19	5,54
Belanja Tidak Terduga	17.477.058.600	2.000.000.000	4.113.464.984	8,56	0,63
Belanja Langsung	**440.859.382.127,95**	**476.767.959.543**	**313.764.439.573**	**(13,02)**	**31,23**
Belanja Pegawai	65.845.161.697	61.726.751.975	37.581.438.760	(22,69)	4,21
Belanja Barang dan Jasa	152.178.953.751	158.588.914.681	135.879.894.183	(5,05)	11,32
Belanja Modal	222.835.266.680	256.452.292.887	140.303.106.630	(15,10)	15,70
Jumlah Belanja	**1.212.129.905.597,15**	**1.403.107.774.645**	**1.345.088.104.296**	**5,81**	**100,00**

Sumber : BPKD Kab. Garut, Tahun 2007 (Anggaran Perubahan dan Tahun 2008 dan 2009 (Anggaran Murni)

4.3.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dana pembangunan yang bersumber dari APBN diantaranya APBN Tugas Pembantuan, yang selama tahun 2007-2009 alokasinya

terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 alokasi APBN Tugas Pembantuan sebesar Rp. 39,70 Milyar kemudian meningkat pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 61,29 Milyar dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 113,46 Milyar yang tersebar di beberapa SOPD Rincian lengkapnya disajikan pada tabel 4.15.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Dana APBN Tugas Pembantuan Kabupaten Garut Tahun 2007-2008

NO	SKPD	Alokasi Anggaran		
		Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Disnakersostrans	1.659.000.000	1.627.112.000	6.125.000.000
2	Disperindag	-	1.650.000.000	
3	Dinas SDAP	1.971.680.000	10.282.061.000	11.253.430.000
4	RSU dr. Slamet	6.500.000.000	4.250.000.000	
5	Dinas Kesehatan	341.519.000	125.500.000	
6	Dinas Pendidikan	126.240.000	2.934.000.000	
7	Kantor Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Dan Ketahanan Pangan	520.000.000	3.387.455.000	4.469.154.000
8	Disnakanla	742.500.000	1.846.000.000	576.000.000
9	Dinas Kehutanan	1.155.603.000		
10	Dinas Pertanian	15.290.240.000	9.077.450.000	12.355.545.000
11	BAPPEDA	1.732.500.000		
12	SEKRETARIAT DAERAH	9.663.320.000	26.111.080.000	78.688.900.000
Jumlah		**39.702.602.000**	**61.290.658.000**	**113.468.029.000**

Sumber : BPKD Kab. Garut, Tahun 2008 (Anggaran Perubahan dan Tahun 2008 dan 2009 (Anggaran Murni)

4.3.4 Dana Masyarakat dan Mitra

Dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang dicanangkan oleh Kabupaten Garut, diperlukan dukungan dana dan kontribusi dari semua pihak. Dana pembangunan tidak saja berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun juga bersumber dari *private*/swasta dan masyarakat. Proporsi dana yang berasal dari swasta dan masyarakat ini sangat besar dibandingkan dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintah.

Tabel 4.16
Investasi Kabupaten Garut Tahun 2004-2008

Uraian	Tahun					
	2004	2005	2006	2007*	2008**	2009 **
Investasi (milyar)	1.796,32	1.983,70	2.293,70	2.462,37	2.922,46	3.305,49
PDRB-harga konstan (milyar)	8.418.445	8.768.410	9.128.808	9.563.128	10.021.184	10.693.007
LPE (%)	4,01	4,16	**4,11**	**4,76**	**4,79**	**6,7**

Sumber : BPS Kab. Garut (Desember 2009)
Catatan : * Angka Perkiraan
** Angka Proyeksi

Dari Tabel 4.16 terlihat bahwa nilai investasi di Kabupaten Garut selama kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan dari berjumlah Rp. 1,79 trilyun pada tahun 2004 menjadi Rp. 3,3 trilyun pada tahun 2008. Angka tersebut merupakan dana investasi yang bersumber dari Pemerintah (APBD dan APBN) dan swasta/mitra. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2008 masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 47,14%, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,89% dan sektor Jasa sebesar 9,4%. Kondisi perekonomian makro Kabupaten Garut mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2004-2008, hal ini ditunjukan dengan peningkatan LPE sebesar 4,01% pada tahun 2004 menjadi 4,79% pada tahun 2008. Hal tersebut menurut BPS Kab Garut, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut didukung oleh stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga, dan bersumber dari meningkatnya pertanian dan perdagangan, konsumsi dan bertambahnya kegiatan investasi. Hal yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi. Walaupun dalam kurun waktu 2004-2008, trend investasi menunjukkan kecenderungan yang meningkat, namun peningkatan belum memberikan nilai yang signifikan. Oleh karena

itu diperlukan upaya-upaya yang lebih kreatif untuk menarik minat peran swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Garut.

Dengan adanya peningkatan efisien ekonomi serta potensi dan daya tarik yang cukup besar, diharapkan investor akan menanamkan modalnya di Kabupaten Garut sehingga diharapkan akan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kepastian hukum, kondisi keamanan yang stabil, potensi ekonomi, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, dan tersedianya sistem infrastruktur fisik yang baik adalah merupakan faktor-faktor yang menentukan dalam menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu daerah. Dalam survey tersebut, juga ditemukan bahwa faktor-faktor inilah yang banyak menjadi kendala Pemerintah Daerah untuk menarik investor menanamkan modal.

Dengan melihat kondisi permasalahan ketersediaan infrastruktur fisik yang belum memadai, belum terpadunya sistem kebijakan yang mendukung investasi, belum adanya *mapping* potensi ekonomi yang akurat di wilayah Garut, dan masih rendahnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dapat menjadi kendala dalam upaya menarik investor ke Kabupaten Garut.

4.3.5 Arah Kebijakan APBD dan Dana Masyarakat/Mitra

4.3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang

bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Untuk itu, kebijakan pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2010-2014 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Garut sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Namun demikian, meski punya landasan yang legal, kebijakan peningkatan PAD semestinya juga mengacu pada visi-misi dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Upaya penggalian sumber – sumber pendapatan daerah yang potensial dengan memperhatikan asas keadilan, daya pikul masyarakat maupun tingkat pelayanan yang di berikan oleh pemerintah daerah sendiri. Artinya, kebijakan PAD dalam bentuk pajak dan retribusi harus tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin. Jika Garut akan meningkatkan pembangunan manusia, maka segala pungututan seperti retribusi puskesmas, rumah sakit, pendidikan, dan sejenisnya sudah selayaknya dihilangkan karena itu kontra produktif. Sebaliknya pemerintah telah melirik kegiatan investasi daerah yang dipandang menguntungkan dan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.

Dalam konteks PAD, perlu dipahami bersama bahwa otonomi daerah tidak berarti daerah harus dapat membiayai sendiri seluruh

pengeluaran rutin dan modalnya dari Pendapatan Asli Daerah, karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan. Penetapan terget pendapatan harus didasarkan pada data potensi yang akurat dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan Asli Daerah perlu dihitung secara sistematis, rasional dengan prinsip ekonomis, efisien, dan adil serta sederhana pengadministrasiannya.

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2010-2014 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu:

1. **Pendapatan Asli Daerah** yang merupakan hasil penerimaan dari sumber- sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
    a. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat disertai peningkatan kualitas SDM Petugas Pemungut PAD;
    b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
    c. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah;
    d. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan

perluasan subyek dan obyek pajak. Atau meninjau ulang beberapa ketetapan pajak dan retribusi daerah;

e. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
f. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
g. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
h. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
i. Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/ wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
j. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ wajib retribusi yang telah sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan;
k. Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD Penghasil.
l. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi Pendapatan Daerah;
m. Peningkatan dan penggalian potensi sumber-sumber

pendapatan lain disertai pembentukan payung hukumnya, diantaranya dengan melakukan inovasi pendapatan daerah, seperti pengelolaan air, pengelolaan bidang lain yang terkait dengan wisata, tambang, pengelolaan sumber daya alam dan mineral yang tidak merusak lingkungan;

n. Pembentukan BLUD dan BUMD untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang dikelola secara profesional.

2. **Dana Perimbangan** yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiscal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

   a. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah (PPh Perseorangan, BPHTB, PBB) guna meningkatkan bagian bagi hasil pajak;
   b. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
   c. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
   d. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN (khususnya DAK dan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana/DISP) dan APBD Provinsi.

e. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;

f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan, diantaranya untuk memperoleh pendapatan dari pengelolaan SDA berupa dana bagi hasil dari sumber energi panas bumi kawah Darajat yang dikelola PT Chevron Geothermal Indonesia (CGI), disamping kemungkinan untuk memperoleh hasil dari pengelolaan perkebunan besar di Kabupaten Garut yang hingga saat ini baru diperoleh berupa pajak PBB perkebunan serta potensi pengembangan pengelolaan sumber pertambangan.

3. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan kabupaten lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari provinsi.

Tabel 4.17
Asumsi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	JUMLAH PENDAPATAN
2009	91.428.550.187	1.188.646.099.000	61.663.455.109	1.341.738.104.296
Proporsi (%)	6,81	88,59	4,6	100
2010	100.571.405.206	1.259.964.864.940	67.829.800.620	1.428.366.070.766
Proporsi (%)	7,04	88,21	4,75	100
2011	112.137.116.804	1.335.562.756.836	74.612.780.682	1.522.312.654.323
Proporsi (%)	7,37	87,73	4,9	100
2012	126.714.941.989	1.415.696.522.247	82.074.058.750	1.624.485.522.986
Proporsi (%)	7,8	87,15	5,05	100
2013	145.088.608.577	1.500.638.313.581	90.281.464.625	1.736.008.386.784
Proporsi (%)	8,36	86,44	5,2	100
2014	166.851.899.864	1.590.676.612.396	99.309.611.088	1.856.838.123.348

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	JUMLAH PENDAPATAN
Proporsi (%)	8,99	85,67	5,35	100

Sumber : BPS Kab. Garut (Agustus 2010)

4.3.5.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2009-2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
b. Profesionalitas;
c. Proporsionalitas;
d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Disamping prisip-prinsip di atas juga diperlukan instrument pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi : Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Analisa Belanja (SAB), Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya. Ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2010-2014 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM Tahun 2008 yang baru sebesar 70,61 (angka proyeksi), diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2010-2014 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Garut yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Kebijakan Belanja Langsung diutamakan untuk membiayai belanja modal dengan dukungan belanja pegawai serta belanja barang dan

jasa secara efisien. Efisiensi belanja pegawai ditempuh melalui kebijakan tidak menambah lagi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Garut;
5. Dalam hal pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya dilakukan berdasarkan unit harga satuan yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Disamping itu, juga diarahkan menyelenggarakan sistem pengadaan barang satu atap, untuk mengurangi resiko pemborosan dan korupsi. Waktu pengadaan barang juga tidak belanja sekaligus, melainkan per 3 bulan dengan menyesuaikan kebutuhan dan standar harga barang. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, maka perlu didukung oleh beberapa hal, sebagai berikut:
   a. Konsisten melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengandaan barang dan jasa.
   b. Meminimalkan pemberian uang muka (UMK) kepada penyedia barang dan jasa.
   c. Menetapkan standar harga barang setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali.

d. Meminimalkan ekonomi biaya tinggi dalam pengadaan barang dan jasa baik dengan menghindari sistem bagi-bagi pekerjaan, menghilangkan biaya-biaya yang tidak sesuai ketentuan (“*dana siluman”*), maupun dengan meningkatkan profesionalisme pengelola kegiatan.

6. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
7. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus menjamin pelayanan pendidikan dasar bagi penduduk miskin melalui penuntasan Wajar DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja

akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis ‘desa membangun’, pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta BMT, pegembangan usaha pasar tradisional, fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha informal, fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran produk unggulan, peningkatan dukungan infrastruktur pedesaan;

10. Dalam rangka peningkatan investasi, anggaran belanja diarahkan pada pengembangan promosi investasi, pelayanan perijinan sistem satu pintu;
11. Dalam mendukung pariwisata dan pelestarian budaya, anggaran belanja diarahkan pada peningkatan daya tarik wisata, dengan tetap memperhatikan faktor kelestarian lingkungan dan budaya lokal, peningkatan pengelolaan aset-aset warisan budaya daerah menjadi objek daya tarik wisata yang atraktif dengan pendekatan profesionalisme, kemitraan swasta, pemerintah dan masyarakat.
12. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10% diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan, pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam perluasan kesempatan kerja melalui Padat Karya Produktif;
13. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan

dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan jalan, jembatan dengan mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan; mengembangkan jaringan prasarana jalan eksternal Kabupaten Garut dengan wilayah sekitar serta meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi pertanian di perdesaan; mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan prasarana jalan; peningkatan pelayanan perhubungan; fasilitasi dan stimulasi penyediaan rumah sederhana sehat serta memenuhi syarat teknis bangunan bagi masyarakat; pemberdayaan komunitas perumahan dan permukiman dalam penyediaan dan pemeliharaan sanitasi dasar lingkungan; mengembangkan kebijakan Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Irigasi; aksesibilitas sumber air baku dan listrik;

14. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Garut, Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan; melanjutkan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) bersama masyarakat; Kebijakan hutan kemasyarakatan (social forestry) dalam bentuk sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; mengantisipasi resiko bencana; peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dalam rangka mendukung upaya pencapaian 80% Kawasan Lindung; Peningkatan sarana

dan prasarana pengelolaan persampahan terutama di perkotaan; pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;

15. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya. (performance-based budgeting)
16. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan;
17. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
    a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kebijakan penambahan pegawai hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru, tenaga medis dan tenaga teknis.
    b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
    c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada

perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
e. Mengalokasikan belanja hibah diarahkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan secara selektif dan rasional, tidak mengikat/tidak secara terus-menerus tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut.
f. Mengalokasikan belanja tidak terduga diarahkan pada kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
g. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada

pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut untuk meningkatkan pembangunan perdesaaan berbasis desa membangun melalui peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendekatkan akses pendanaan pembangunan kepada masyarakat secara langsung.